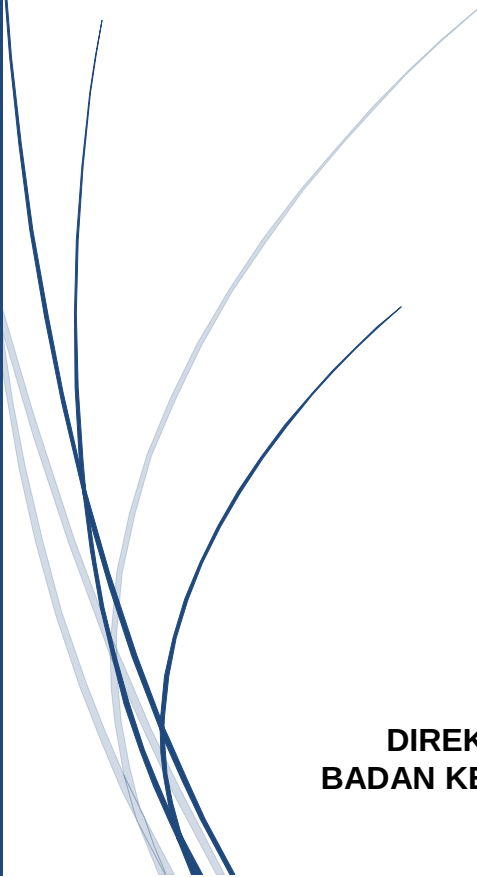


A blue arrow graphic pointing to the right, containing the year "2020".

2020

LAPORAN

EVALUASI DOKUMEN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Decorative wavy lines in shades of blue and grey on the left side of the page.

**DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunianya. Laporan Evaluasi Dokumen GDPK tahun 2020 berhasil disusun dengan baik. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Laporan Evaluasi Dokumen GDPK Tahun 2020. Laporan Evaluasi Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2020 mencakup tentang perkembangan program GDPK berdasarkan data per Desember 2020. Pada laporan ini tercakup evaluasi mengenai kuantitas serta kualitas penyusunan dokumen GDPK yang telah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Laporan Evaluasi Dokumen GDPK Tahun 2020 ini juga bermanfaat untuk mengukur kinerja perkembangan Program GDPK yang setiap tahunnya terus dipantau karena merupakan salah satu target kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana kerja strategis BKKBN tahun 2020-2024. Sehingga Laporan ini merupakan suatu acuan/referensi baik untuk internal BKKBN ataupun untuk eksternal BKKBN. Diantara mitra kerja yang bekerja bersama untuk memantau perkembangan GDPK ini adalah Bappenas, Kementerian Dalam Negeri serta Kemenko PMK oleh karena itu Laporan Evaluasi Dokumen GDPK Tahun 2020 ini akan kami feedbackkan kepada mitra-mitra kerja tersebut. Harapannya ke depan, kerjasama diantara mitrakerja untuk program GDPK ini semakin terjalin erat dalam rangka mengawal dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan baik ditingkat nasional, provinsi serta kabupaten/kota di era otonomi daerah ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Evaluasi Dokumen GDPK Tahun 2020 ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Evaluasi Dokumen GDPK Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi kesuksesan program GDPK dimasa mendatang.

**Direktur Perencanaan
Pengendalian Penduduk,**



DR. Munawar Asikin, S.Si, M.SE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan memberi amanat kepada pemerintah di setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/Grand Design Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK). Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) terdiri atas 5 (lima) pilar, yaitu ⁽¹⁾ Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk, ⁽²⁾ Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, ⁽³⁾ Pilar Pembangunan Keluarga, ⁽⁴⁾ Pilar Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk, serta ⁽⁵⁾ Pilar Penataan Data dan Administrasi Kependudukan. Dengan kata lain, GDPK diharapkan dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan kependudukan dengan rumusan bahwa pembangunan kependudukan merupakan upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Posisi Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. Namun agar dokumen GDPK berdaya dan memiliki kemampuan untuk menjadi bahan rujukan arah perencanaan pembangunan maka dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dimana tahap penyiapan, kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, yang kemudian dimatangkan melalui konsensus maupun isi dari dokumen GDPK. Oleh karena itu pemantauan terhadap perkembangan penyusunan dokumen GDPK. Selain dari sisi kuantitas penyusunannya, maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari dokumen tersebut dan kemudian pemanfaatannya.

Laporan Evaluasi Dokumen GDPK Tahun 2020 mencakup tentang jumlah dan juga kualitas penyusunan dokumen GDPK. Karena kedepannya penyusunan GDPK 5 Pilar harus semakin di dorong, sementara sampai saat ini masih sedikit sekali pemerintah daerah yang sudah menyusun dokumen GDPK 5 Pilar. Berdasarkan dokumen GDPK yang diserahkan kepada Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk (Ditrenduk) per Desember Tahun 2020 terdapat 283 dokumen kabupaten/kota yang menyerahkan dokumen GDPK, sedangkan provinsi ada 31 dokumen GDPK yang sudah menyerahkan ke BKKBN. Namun, setelah

dilakukan verifikasi ulang ternyata hanya 277 dokumen GDPK yang dapat dievaluasi karena ada 3 dokumen yang tidak dapat memenuhi syarat kelengkapan evaluasi. Sementara untuk provinsi ada 31 dokumen GDPK yang dapat dievaluasi. Berikut adalah beberapa temuan utama yang perlu menjadi perhatian dari hasil analisis terhadap 227 dokumen GDPK Kabupaten/kota dan 31 dokumen GDPK provinsi antara lain:

Mayoritas pilar yang dicakup mayoritas hanya 1 Pilar. 51 persen Kab/Kota dan 61 persen provinsi, sementara itu hanya sekitar 32 persen kab/kota dan 32 persen provinsi dari dokumen yang ada berhasil menyusun GDPK 5 Pilar. Kelengkapan dokumen GDPK seperti legalitas dan keberadaan SK Tim penyusun juga masih lemah. Padahal keberadaan kedua hal tersebut dapat membantu menguatkan posisi dokumen GDPK dan juga meningkatkan pemanfaatan dokumen tersebut sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hanya 16 persen untuk kabupaten/kota dan 16 persen untuk provinsi yang telah menjadikan dokumen GDPK dengan legalitas. Sementara untuk SK Tim penyusun ada sekitar (22 persen kabupaten/kota, 42 persen).

Dari sisi analisis kependudukan, analisis yang disajikan hanya sekedar menampilkan data-data saja tanpa menghubungkannya dengan permasalahan yang harus diprioritaskan dan diselesaikan untuk selanjutnya disepakati dan ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan, strategi serta roadmap pada bab berikutnya. Sebagian besar dokumen masih menitikberatkan pada indikator kuantitas, sementara itu indikator Pembangunan Keluarga, Mobilitas serta Penataan Data dan Administrasi Kependudukan paling sedikit dibahas dan dicantumkan.

Berdasarkan uraian temuan utama diatas maka tindak lanjut penyusunan dokumen GDPK antara lain mendorong terus penyusunan GDPK 5 Pilar. Untuk daerah yang belum menyusun GDPK, maka harus segera menyusun dokumen GDPK 5 Pilar, sedangkan untuk daerah yang sudah menyusun GDPK 5 pilar segera merevitalisasi/mengupdate nya sesuai dengan Panduan GDPK 5 Pilar yang telah disusun. Analisis kependudukan harus lebih diperkuat sehingga menghasilkan isu-isu strategis yang disepakati untuk diselesaikan bersama melalui arah kebijakan dan strategi yang sesuai dan dipetakan dalam bentuk pada roadmap pembangunan kependudukan;

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
a. Tujuan Umum	2
b. Tujuan Khusus	2
BAB II. METODOLOGI	4
A. Pendekatan Evaluasi	4
B. Variabel dan Indikator Evaluasi	4
a. Variabel Input	5
b. Variabel Proses	5
c. Variabel Output	5
C. Tahapan Evaluasi	9
D. Limitansi dalam Evaluasi	9
BAB III. VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN GDPK	10
A. Rekapitulasi Pelaporan Dokumen GDPK sd Desember 2020	10
B. Bentuk Dokumen yang Dikumpulkan	13
C. Kelengkapan Legalitas Dokumen GDPK	14
BAB IV. ANALISIS DOKUMEN GDPK	18
A. Cakupan Pilar Pembangunan Kependudukan	18
B. Analisis Isi Dokumen	20
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	27
A. Kesimpulan	27
B. Rekomendasi	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN TABULASI PER PROVINSI	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/Grand Design Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya. Dengan kata lain, GDPK diharapkan dapat digunakan oleh pemangku kebijakan sebagai acuan perencanaan pembangunan kependudukan di semua tingkatan wilayah. Pembangunan kependudukan merupakan upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) terdiri atas 5 (lima) pilar, yaitu ⁽¹⁾ Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk, ⁽²⁾ Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, ⁽³⁾ Pilar Pembangunan Keluarga, ⁽⁴⁾ Pilar Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk, serta ⁽⁵⁾ Pilar Penataan Data dan Administrasi Kependudukan.

Dengan memperhatikan karakteristik persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang pada setiap wilayah serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu Grand Design Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang sinergis, konvergen dan berkesinambungan. Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai manifestasi arahan kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu diharapkan akan diinternalisasi ke dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan baik nasional maupun daerah.

Mengingat posisi Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, maka tata cara penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang dimulai dari tahap penyiapan, kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, yang kemudian dimatangkan melalui konsensus maupun isi dari dokumen GDPK mulai rancang bangun permasalahan, analisis situasi kependudukan, analisis capaian pembangunan kependudukan, ketepatan menyusun isu strategis, penetapan visi dan misi

serta penentuan arah kebijakan dan strategi mempunyai kedudukan yang penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variable yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

Berdasarkan *monitoring* data Rekapitulasi Laporan Penyusunan GDPK bulan Desember tahun 2020, **dilaporkan** sudah ada 32 provinsi dan 342 kabupaten/kota yang sudah menyusun dokumen GDPK. Namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen baik berbentuk *softfile* maupun cetak hanya terdapat 31 dokumen GDPK provinsi dan 277 dokumen GDPK kabupaten/kota.

Mengingat bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan diperlukan sebuah evaluasi dokumen GDPK 5 Pilar tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi terhadap dokumen-dokumen GDPK yang ada dapat digunakan untuk memperbaiki penyusunan dokumen GDPK maupun dalam rangka meningkatkan kualitas isi dari dokumen sehingga dapat mendorong pemanfaatan GDPK dalam rangka mewujudkan pembangunan kependudukan yang tepat dengan kondisi dan situasi wilayah dan juga mendorong pencapaian-pencapaian tujuan-tujuan dari pembangunan nasional.

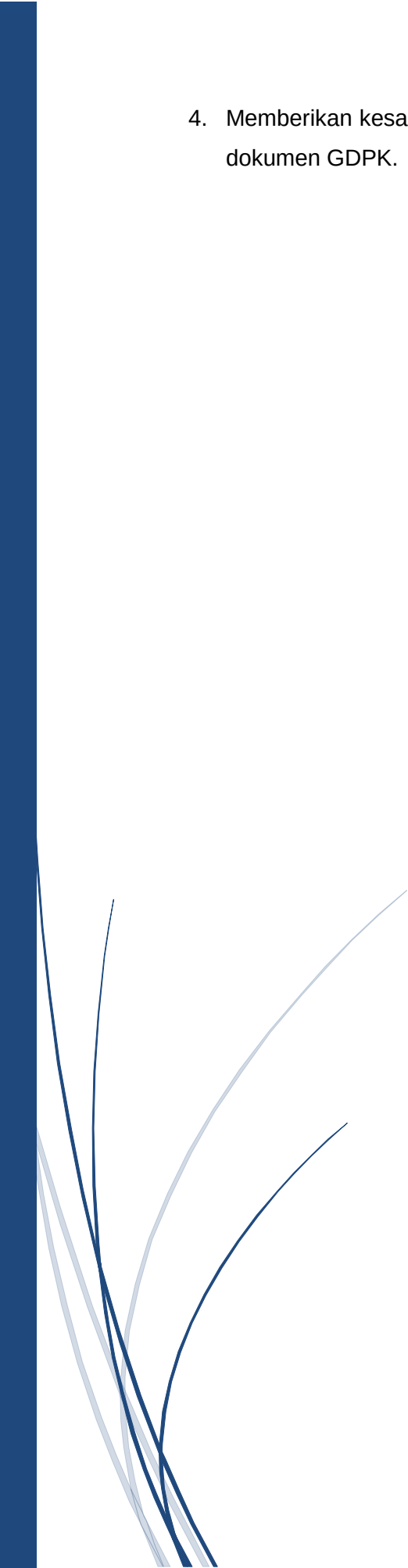
B. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tersedianya analisis kualitas dokumen GDPK provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi masukan bagi perbaikan penyusunan dokumen GDPK serta mendukung peningkatan pemanfaatan GDPK dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan kependudukan dimasa mendatang.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui pola-pola penyusunan dokumen GDPK yang sudah ada;
2. Menemukan kesulitan-kesulitan dan kesalahan-kesalahan dalam penyusunan GDPK;
3. Memberikan masukan bagi perbaikan kualitas penyusunan dokumen GDPK;

- 
4. Memberikan kesamaan pemahaman dan pengetahuan tentang teknik penyusunan dokumen GDPK.

BAB II

METODOLOGI

A. Pendekatan Evaluasi

Pendekatan yang digunakan dalam mengevaluasi dokumen GDPK adalah dengan menggunakan pendekatan *desk review* dengan melakukan analisis isi (*content analysis*). Berbeda dengan penelitian evaluasi pada umumnya, pendekatan ini digunakan mengingat analisis isi sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi dapat dipakai untuk melihat isi dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang disampaikan dari 32 Provinsi dan 277 dokumen kabupaten dan Kota.

B. Variabel dan Indikator Evaluasi

Variable dan indikator dalam melakukan evaluasi GDPK pada dasarnya meliputi:

No	Variabel	Indikator
1	Input	Legalitas: 1. Surat Keputusan Kepala Daerah yang menugaskan penyusunan GDPK 2. Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah yang mengesahkan GDPK
2	Proses	Keterlibatan Multipihak/Multisektor dalam penyusunan GDPK
3	Output	Analisis isi dokumen, meliputi: 1. Cakupan Pilar 2. <i>State Of The Art</i> 3. Proyeksi dan Analisisnya 4. Visi dan Misi 5. Target 6. Kebijakan dan Strategi 7. Peta Jalan
4	Outcome	Internalisasi GDPK dalam dokumen perencanaan pembangunan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Rencana Kerja Perangkat Daerah 4. Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan

Namun demikian dalam laporan kali ini khusus membahas dalam 3 (tiga) variabel yaitu variable input, proses dan output yang seharusnya tercantum dalam dokumen, sedangkan

variable outcome yang lebih kepada pemanfaatan dokumen GDPK dalam perencanaan pembangunan belum dilakukan evaluasi.

Berikut disampaikan penjelasan masing-masing variable dan indikator dalam evaluasi dokumen GDPK provinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut:

a. Variabel Input

Aspek legalitas mempunyai peran yang signifikan terhadap keberhasilan daerah baik dalam kerangka penyusunan, penyepakatan variable dan indikator target, hingga pada akhirnya GDPK dapat terinternalisasi dalam perencanaan pembangunan daerah, baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun pendek. Indikator dari variable ini meliputi:

1. Surat Keputusan Kepala Daerah yang menugaskan penyusunan GDPK sebagai legal standing penyusunan GDPK
2. Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengesahkan GDPK sebagai legal standing pemanfaatan dan pengimplementasi GDPK

b. Variabel Proses

Sebagai sebuah dokumen grand design, maka dalam proses penyusunannya harus melibatkan serta disepakati oleh seluruh stakeholder pembangunan kependudukan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pemangku kepentingan di tingkat nasional sudah diberikan arahnya, namun demikian berbeda dengan tingkat provinsi serta kabupaten dan kota yang masih memberikan ruang untuk dilakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam penyusunan maupun pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Identifikasi pemangku kepentingan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan didasarkan pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi kelembagaan, serta rekam jejak dan kompetensi terhadap pengembangan pembangunan di bidang kependudukan. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, swasta, akademisi, lembaga profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun institusi pendidikan.

c. Variabel Output

Inti dari evaluasi dokumen adalah melakukan analisis terhadap isi dokumen yang disajikan oleh *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Berdasarkan hasil review maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Ketercakupan pilar.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengelolaan kuantitas penduduk

Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dilaksanakan melalui upaya pembudayaan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera dalam Program Keluarga Berencana (KB).

b) Peningkatan kualitas penduduk

Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

c) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

d) Pembangunan keluarga berkualitas

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan, keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

e) Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan

Pada pilar ke lima ini, tujuan utamanya adalahnya terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan.

2. State Of The Art penyusunan GDPK

Pendahuluan dalam GDPK harus mencerminkan *state of the art* kebutuhan penyusunan GDPK (kondisi kependudukan, ringkasan problem pembangunan kependudukan, pentingnya GDPK sebagai *bridgeing* terhadap penanganan pembangunan kependudukan) secara komprehensif.

3. Proyeksi dan Analisisnya

Proyeksi penduduk berfungsi sebagai titik awal bagi sebagian besar proyeksi yang dibutuhkan di masa depan (kebijakan, anggaran, strategi percepatan dll). Hal ini juga merupakan hal yang penting bagi diskusi mengenai kebijakan. Aspek pokok dari proses kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang timbul dan memasukkan masalah tersebut dalam agenda kebijakan. Mengingat dalam pembangunan, penduduk adalah subjek maupun objek pembangunan, maka penting kita memperediksi berapa jumlah, struktur, maupun persebarannya dalam konteks pembangunan.

Kemampuan prediktif dari proyeksi penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan prediktif sebuah analisis dampak kependudukan maupun pembangunan, proyeksi penduduk digunakan untuk mengilustrasikan seberapa besar masalah ke depan. Selain itu, proyeksi penduduk juga diperlukan pada proses kebijakan yang membutuhkan proposal dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam kasus ini, proyeksi penduduk menyajikan seberapa besar pelayanan yang dibutuhkan untuk solusi dan perubahan yang diajukan pada indikator berbasis populasi yang akan dihasilkan.

4. Visi dan Misi

Visi didefinisikan sebagai “rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami, dalam rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat serta “berorientasi kepada pemangku kepentingan”. Rumusan visi selain berorientasi kepada pemangku kepentingan, juga menunjukkan nuansa *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pembangunan kependudukan rumusan visi tersebut juga menunjukkan inklusifitas Pemerintah Daerah dalam upayanya mencapai tujuan akhir pembangunan kependudukan dengan pelibatan seluruh pihak dan partisipasi aktif masyarakat yang berlandaskan gotong royong.

Sedangkan misi didefinisikan sebagai “rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. Upaya-upaya dimaksud dijabarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara beberapa pihak menekankan bahwa rumusan misi dimaksudkan untuk menjelaskan alasan dilakukannya sebuah program pembangunan. Lebih khusus, Misi juga harus dapat menggambarkan sesuatu yang akan diberikan stakeholder pembangunan masyarakat dan penerima manfaat.

5. Target

Target memuat indikator dan parameter serta besaran angka target-target yang akan dicapai dalam 5 pilar pembangunan kependudukan.

6. Kebijakan dan Strategi

Menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah serta strategi pencapaiannya dalam pembangunan 5 pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan (jangka menengah dan tahunan) yang direncanakan pada lima (5) pilar pembangunan kependudukan tersebut.

7. Peta Jalan

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* dan ditetapkan melalui Kepala Daerah (pemerintah daerah) agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Dokumen Roadmap Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan melalui Roadmap Pembangunan Kependudukan. Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD, Roadmap Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

C. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi dokumen GDPK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pengentrian data dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2020
- Tabulasi dan analisis dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2020
- Penulisan Laporan dilakukan pada bulan Desember 2020

D. Limitansi dalam Evaluasi

- Evaluasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen GDPK yang diserahkan ke BKKBN Pusat sejak tahun 2011 sampai dengan Desember tahun 2020.
- Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen yang diterima, dokumen yang dapat dievaluasi berjumlah 277 dokumen GDPK kabupaten/kota dan 31 dokumen GDPK Provinsi. Hal ini disebabkan adanya dokumen yang belum lengkap atau masih berupa draft, hanya cover, bukan dokumen GDPK atau karena dokumen GDPK tidak dapat ditemukan (untuk dokumen yang tidak sesuai dengan pelaporan BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi telah melakukan konfirmasi pelaporan).
- Evaluasi dokumen GDPK yang ditunjuk merupakan pengampu kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyusunan GDPK pada Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, berjumlah 14 evaluator dari Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk dan 5 evaluator dari Direktorat Pemaduan Kebijakan Kependudukan.
- Evaluasi Dokumen dilaksanakan secara *desk reviu* dengan bantuan instrumen *google form* yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diisi oleh para evaluator dengan sebelumnya diberikan pembekalan agar evaluator memiliki kesamaan persepsi dalam menilai dokumen GDPK yang ada.
- Evaluasi yang dilakukan adalah dengan menganalisis dokumen-dokumen yang terkumpul, dilakukan dengan analisis deskriptif sederhana dan ditambah dengan analisis kualitatif berupa *reviu kualitatif* terhadap dokumen GDPK yang ada sehingga hasil analisis yang tersedia akan terbatas pada interpretasi analisis dari dokumen yang ada.
- Evaluator terdiri dari jajaran Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk. Evaluator ini yang mengentri *google form* sesuai dengan GDPK yang dievaluasinya.
- Evaluasi dokumen GDPK tidak mencakup analisis pemanfaatan terhadap pembangunan wilayah karena evaluasi ini hanya menilai dari dokumen GDPK yang tersusun.

BAB III

Verifikasi Kelengkapan Dokumen GDPK

A. Rekapitulasi Pelaporan Dokumen GDPK s.d Desember Tahun 2020

Pelaporan dokumen GDPK kabupaten/kota yang telah terkumpul di BKKBN sampai dengan Desember Tahun 2020 sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Dokumen GDPK
Kabupaten/Kota Per Desember Tahun 2020

No	Provinsi	Jum kab/kota	Melapor Menyusun GDPK		Menyerahkan Dokumen	
			Sudah	Belum	Ya	Tidak
		A	b	c	d	e=b-d
1	Aceh	23	14	9	14	0
2	Sumatera Utara	33	15	18	15	0
3	Sumatera Barat	19	19	0	16	3
4	Riau	12	12	0	12	0
5	Jambi	11	10	1	5	5
6	Sumatera Selatan	17	3	14	3	0
7	Bengkulu	10	10	0	3	7
8	Lampung	15	15	0	15	0
9	Bangka Belitung	7	7	0	7	0
10	Kep. Riau	7	1	6	1	0
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	27	18	9	11	7
13	Jawa Tengah	35	35	0	34	1
14	DI Yogyakarta	5	5	0	5	0
15	Jawa Timur	38	37	1	30	7
16	Banten	8	7	1	6	1
17	Bali	9	9	0	9	0
18	NTB	10	10	0	10	0
19	NTT	22	6	16	4	2
20	Kalimantan Barat	14	14	0	14	0
21	Kalimantan Tengah	14	13	1	13	0
22	Kalimantan Selatan	13	13	0	0	13
23	Kalimantan Timur	10	10	0	10	0
24	Kalimantan Utara	5	5	0	5	0
25	Sulawesi Utara	15	9	6	7	2
26	Sulawesi Tengah	13	10	3	0	10
27	Sulawesi Selatan	24	21	3	21	0
28	Sulawesi Tenggara	17	1	16	1	0
29	Gorontalo	6	6	0	6	0

No	Provinsi	Jum kab/kota	Melapor Menyusun GDPK		Menyerahkan Dokumen	
			Sudah	Belum	Ya	Tidak
		A	b	c	d	e=b-d
30	Sulawesi Barat	6	2	4	2	0
31	Maluku	11	1	10	1	0
32	Maluku Utara	10	2	8	2	0
33	Papua	29	2	27	1	1
34	Papua Barat	13	0	13	0	0
TOTAL		508	342	166	283	59

Tabel 1 menunjukkan bahwa sampai Desember Tahun 2020 terlihat sudah 342 kabupaten/kota telah melaporkan sudah menyusun dokumen GDPK, serta 283 kabupaten/kota yang dilaporkan menyerahkan dokumen GDPK ke BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi. Namun demikian berdasarkan inventarisasi ulang dan verifikasi terhadap keberadaan dokumen hanya 277 dokumen GDPK yang lengkap dan utuh serta dapat dilakukan evaluasi, sedangkan 6 dokumen tidak dapat dievaluasi mengingat kelengkapannya.

Tabel 1.a

Data Kabupaten/Kota yang Dokumen GDPKnya

Tidak Dapat Dievaluasi

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Padang Pariaman
2	Kab. Sinjai
3	Kota Bitung
4	Kab. Dharmasraya
5	Kab. Tanah Datar
6	Kota Pontianak

Tabel 2 menunjukkan bahwa sampai Desember Tahun 2020 sudah 32 provinsi telah melaporkan menyusun dokumen GDPK, namun demikian berdasarkan inventarisasi ulang dan verifikasi terhadap keberadaan dokumen hanya 31 provinsi teridentifikasi telah menyerahkan dokumen GDPK ke BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi. Provinsi yang belum melapor telah menyusun GDPK adalah Provinsi Kalimantan Utara dan Papua Barat, sedangkan provinsi yang melapor sudah menyusun GDPK namun belum dapat diverifikasi keberadaan dokumen hingga batas akhir verifikasi pelaporan adalah Provinsi Banten.

Tabel 2
Rekapitulasi Dokumen GDPK
Provinsi Per Desember Tahun 2020

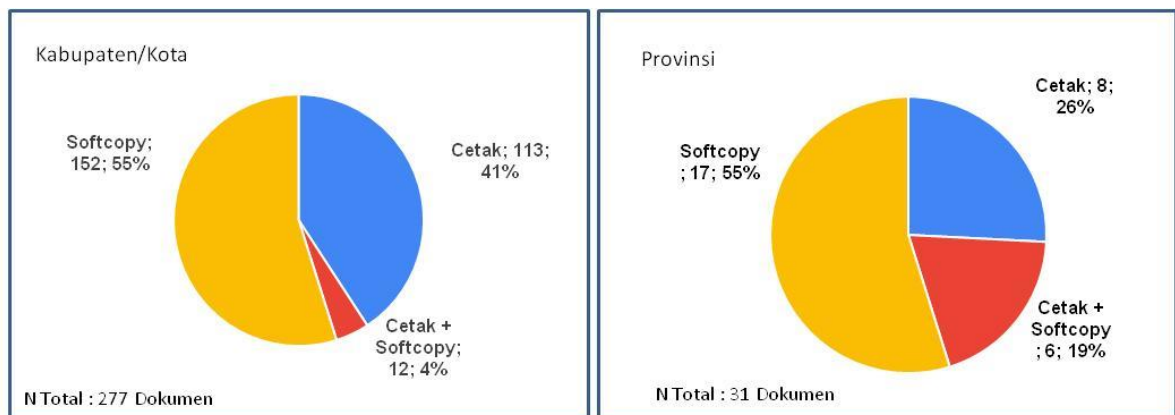
No	Provinsi	Melapor Menyusun GDPK		Menyerahkan Dokumen	
		Sudah	Belum	Ya	Tidak
	a	b	c	d	e=b-d
1	Aceh	1	0	1	0
2	Sumatera Utara	1	0	1	0
3	Sumatera Barat	1	0	1	0
4	Riau	1	0	1	0
5	Jambi	1	0	1	0
6	Sumatera Selatan	1	0	1	0
7	Bengkulu	1	0	1	0
8	Lampung	1	0	1	0
9	Bangka Belitung	1	0	1	0
10	Kep. Riau	1	0	1	0
11	DKI Jakarta	1	0	1	-
12	Jawa Barat	1	0	1	0
13	Jawa Tengah	1	0	1	0
14	DI Yogyakarta	1	0	1	0
15	Jawa Timur	1	0	1	0
16	Banten	1	0	0	1
17	Bali	1	0	1	0
18	NTB	1	0	1	0
19	NTT	1	0	1	0
20	Kalimantan Barat	1	0	1	0
21	Kalimantan Tengah	1	0	1	0
22	Kalimantan Selatan	1	0	1	0
23	Kalimantan Timur	1	0	1	0
24	Kalimantan Utara	0	1	0	0
25	Sulawesi Utara	1	0	1	0
26	Sulawesi Tengah	1	0	1	0
27	Sulawesi Selatan	1	0	1	0
28	Sulawesi Tenggara	1	0	1	0
29	Gorontalo	1	0	1	0
30	Sulawesi Barat	1	0	1	0
31	Maluku	1	0	1	0
32	Maluku Utara	1	0	1	0
33	Papua	1	0	1	0
34	Papua Barat	0	1	0	0
TOTAL		32	2	31	1

a. Bentuk dokumen yang dikumpulkan

Pengumpulan dokumen GDPK dilakukan dalam bentuk soft file maupun cetak. Namun demikian berdasarkan hasil verifikasi ditemukan provinsi maupun kabupaten/kota yang hanya menyerahkan dokumen dalam bentuk softfile atau cetak saja. Berikut distribusi jumlah dan persentase dokumen GDPK berdasarkan bentuk penyerahannya.

Gambar 1.

Jenis Dokumen GDPK yang Ada



Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa jenis dokumen yang diserahkan ke BKKBN mayoritas dalam bentuk softcopy file baik pada dokumen GDPK kabupaten/kota maupun pada dokumen GDPK provinsi. Hanya 6 provinsi dan 12 kabupaten/kota yang menyerahkan dalam bentuk keduanya. Pada dasarnya bentuk dokumen dalam bentuk softcopy tidak menjadi permasalahan dan cenderung memudahkan dalam penyimpanannya, namun demikian bentuk file dokumen yang berupa file *microsoft words* sangat rentan untuk dirubah-rubah dan menjadikan dokumen tersebut bukan dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Aspek legalitas dokumen juga menjadi permasalahan karena pada dokumen dengan bentuk yang demikian tidak disertai dengan aspek legalitas resmi. Hal tersebut bukan menjadi masalah selama dokumen yang diserahkan jelas dan lengkap berbeda dengan dokumen GDPK yang diserahkan dalam bentuk pdf, aspek legalitas pengesahan dan SK seperti tanda tangan dan juga cap basah dari pihak-pihak yang berwenang dapat tercantum dengan baik pada dokumen tersebut.

b. Kelengkapan legalitas dokumen GDPK

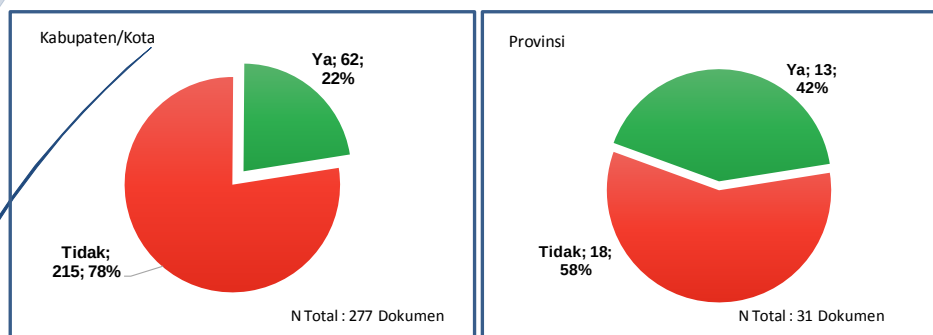
Keberadaan legalitas berupa pengesahan dan SK Tim penyusun merupakan bagian integral yang menyatu dan tidak dipisahkan dalam rangka untuk mendorong pemanfaatan GDPK dalam sinergitas dan integrasi pembangunan kependudukan di daerah. GDPK pada hakikatnya adalah sebuah *living document* atau dokumen yang hidup, dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan serta dimanfaatkan, tidak hanya ditargetkan untuk disusun dan kemudian hanya menjadi dokumentasi semata. Berikut diuraikan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen legalitas pada GDPK.

1. Kelengkapan Surat Keputusan Tim Penyusun GDPK dari Kepala daerah

Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun GDPK dari Kepala Daerah merupakan dimensi penting dalam penyusunan GDPK. Hal ini dikarenakan karena inti dari GDPK adalah sinkronisasi, sinergitas dan konvergensi pembangunan kependudukan dari seluruh sektor yang terlibat. Urusan kependudukan tidak mungkin untuk dilaksanakan dan dikuasai oleh satu sektor saja, oleh karena itu keterlibatan sektor-sektor terkait dalam pembangunan kependudukan menjadi hal yang menjadi perhatian penting dalam penyusunan GDPK. SK Tim selain sebagai legal standing penyusunan GDPK merupakan bentuk dari perwujudan keterpaduan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan kependudukan, hal ini agar terjadi pemahaman bersama tentang pentingnya masing-masing sektor untuk bersepakat, memahami kondisi dan masalah kependudukan pada wilayah masing-masing dan akhirnya dapat berkomitmen dalam merumuskan tujuan dan target-target pembangunan kependudukan yang dituangkan dalam dokumen GDPK sehingga pada akhirnya akan bersinergi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari dokumen GDPK yang telah disusun maka dapat terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2.

Persentase Dokumen GDPK yang Melampirkan SK Tim Penyusun



Gambar 2 menunjukkan sebagian besar dokumen GDPK yang ada tidak melampirkan SK Tim Penyusun dalam dokumen GDPK. Untuk provinsi hanya sekitar 13 dokumen atau

sekitar 42 persen, sementara untuk kabupaten/kota hanya 62 dokumen atau 22 persen dari dokumen yang ada.

Keterlibatan lintas sektor dalam penyusunan GDPK dilihat dari analisis terhadap dari 13 dokumen GDPK Provinsi dan 62 dokumen GDPK kabupaten/kota yang menyertakan, dapat terlihat pada table 2a.

Tabel 2a.
Pengesahan SK Tim Penyusun GDPK

SK Tim Kabupaten/Kota			SK Tim Provinsi	
Yang Menandatangani SK Tim	n	%	Yang Menandatangani SK Tim	n
Bupati/ Walikota	53	85,5	SK Gubernur	9
Kepala Dinas OPD PPKB			SK Kaper	1
(Pengendalian Penduduk dan KB)	8	11,3	Tidak Jelas	1
Universitas Sam Ratulangi	1	1,6	Lainnya	2
Total	62		Total	13

Dalam Tabel 2a terlihat bahwa SK Tim Penyusun provinsi pada 9 dokumen ditandatangani oleh Gubernur, sedangkan untuk kabupaten/kota 53 dokumen ditandatangani oleh bupati/walikota. Sesuai dengan amanat Perpres 153 Tahun 2014 tentang GDPK, maka hanya 9 dokumen Provinsi dan 53 dokumen kabupaten/kota yang sesuai dalam hal SK Tim Penyusun GDPK.

Pada tersebut tersebut terlihat bahwa SK Tim Penyusun provinsi pada 9 dokumen ditandatangani oleh Gubernur, sedangkan untuk kabupaten/kota 54 dokumen ditandatangani oleh bupati/walikota. Sesuai dengan amanat Perpres 153 Tahun 2014 tentang GDPK, maka hanya 9 dokumen Provinsi dan 54 dokumen kabupaten/kota yang sesuai dalam hal SK Tim Penyusun GDPK.

Pada panduan GDPK 5 Pilar dari BKKBN Tahun 2020, selain SK Tim penyusunan GDPK, terdapat juga kewajiban untuk menyusun SK Tim Pelaksana GDPK untuk mendorong diimplementasikannya GDPK dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan. Tim pelaksana inilah yang akan mengelola dari evaluasi, monitoring dan pelaporannya. Selain itu diharapkan kedepan, dokumen GDPK yang dilaporkan dan diserahkan ke BKKBN Pusat diharapkan menyatu dengan legalitas pengesahan dan SK Tim Penyusun serta SK Tim Pelaksana, baik dokumen cetaknya ataupun soft filenya yang dalam bentuk pdf.

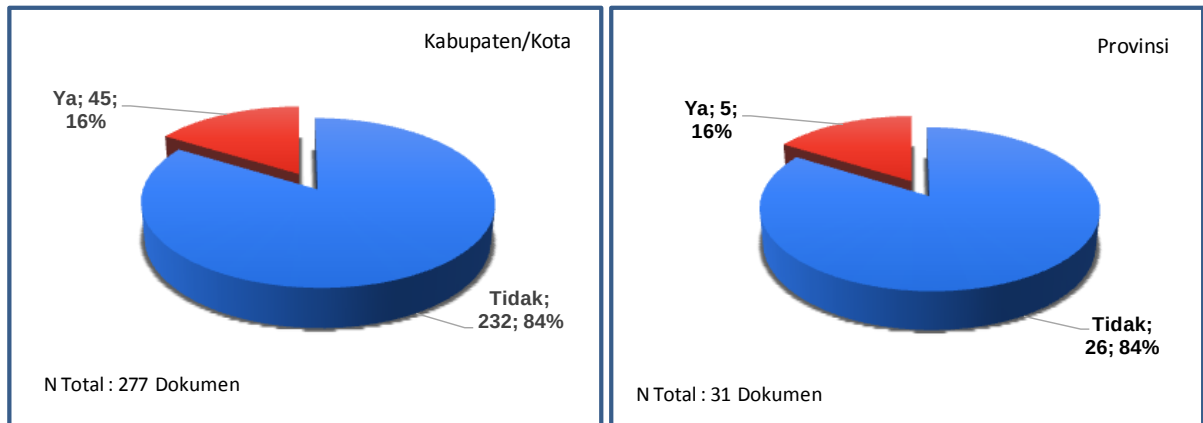
2. Dokumen Pengesahan GDPK oleh Kepala Daerah

Legalitas dokumen GDPK merupakan bentuk pengesahan dan pengakuan dari pemerintah daerah agar dokumen tersebut dapat diakui sebagai dokumen resmi acuan

untuk perencanaan pembangunan kependudukan di daerah. Oleh karena itu pengesahan dokumen GDPK atau legalitas dokumen GDPK diharapkan dapat dilampirkan dalam dokumen GDPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan GDPK di daerah. Pada Gambar 3 jumlah dan persentase dokumen GDPK yang telah memiliki legalitas dan terlampir dalam dokumen GDPK yang diserahkan dapat terlihat sebagai berikut

Gambar 3.

Persentase Dokumen GDPK yang Melampirkan Legalitas



Pada Gambar 3 terlihat bahwa Untuk provinsi hanya 5 dokumen dari 31 dokumen atau sekitar 16 persen dokumen memiliki legalitas. Keempat dokumen yang memiliki legalitas tersebut berbentuk peraturan gubernur antara lain dari provinsi DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Utara.

Sementara itu untuk kabupaten/kota dengan proporsi yang sama dengan provinsi yaitu 16 persen dari 277 dokumen yang memiliki legalitas atau sebanyak 45 dokumen. Bentuk legalitas dokumen GDPK kabupaten/kota ini cukup beragam antara lain peraturan bupati/walikota 37 dokumen, peraturan gubernur 2 dokumen, peraturan daerah 1 dokumen, SK Kepala OPD Bidang KB 2 dokumen, SK Bupati 2 dokumen dan peraturan kepala Bappeda 1 dokumen.

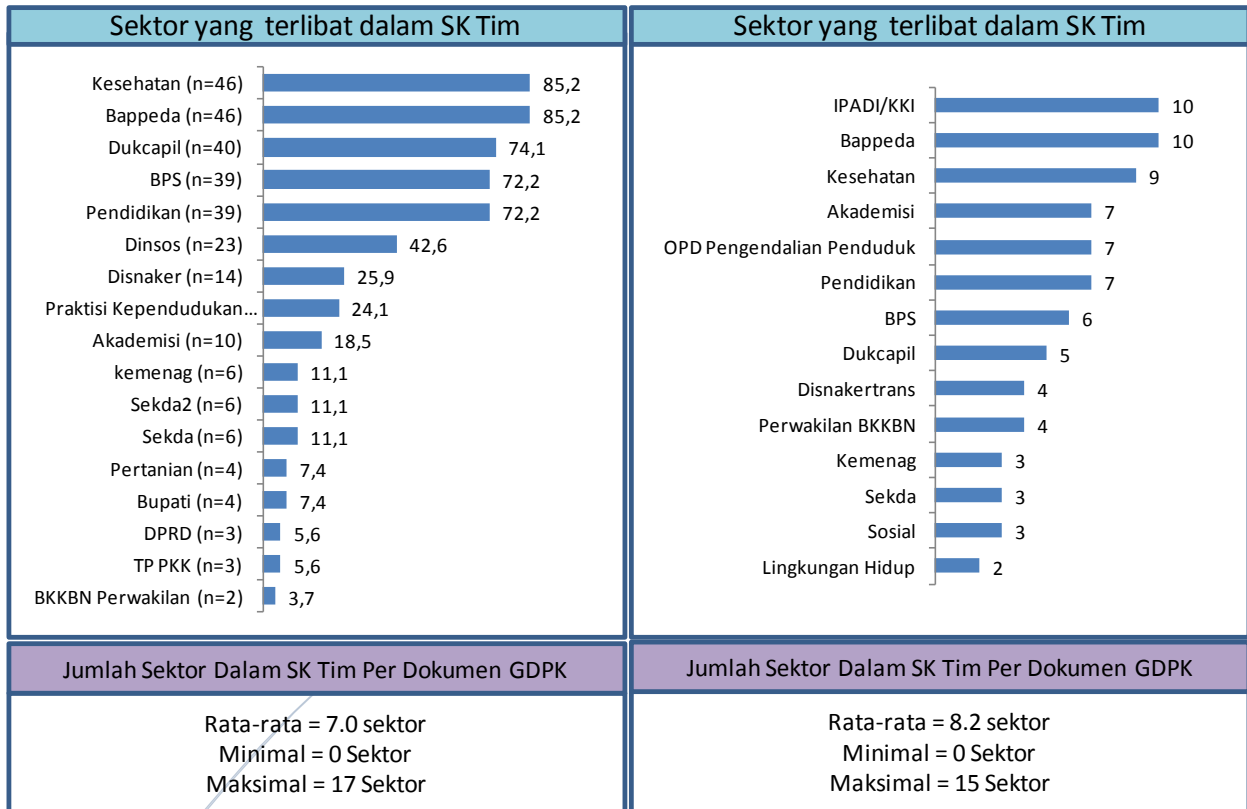
c. Keterlibatan Stakeholder Pembangunan Kependudukan dalam Penyusunan GDPK

Berdasarkan analisis terhadap dokumen pengesahan maupun SK Tim Penyusun GDPK yang dilampirkan dalam dokumen GDPK, maka keterlibatan stakeholder pembangunan kependudukan dalam penyusunan GDPK dapat dilihat bahwa Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pusat Statistik daerah merupakan stakeholder yang paling dilibatkan dari sisi pemerintahan, sedangkan IPADI dan Koalisi Kependudukan merupakan lembaga profesi dan swdaya masyarakat yang paling sering dilibatkan.

Sedangkan apabila hanya dilihat dari jumlah, maka rata-rata dalam menyusun GDPK jumlah stakeholder yang terlibat adalah 8 stakeholder untuk provinsi dan 7 untuk kabupaten/ kota. Sedangkan keterlibatan tertinggi stakeholder pembangunan untuk kabupaten/kota ada 17 institusi di Kabupaten Sijunjung, serta 15 institusi untuk provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 4

Keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan Dokumen GDPK



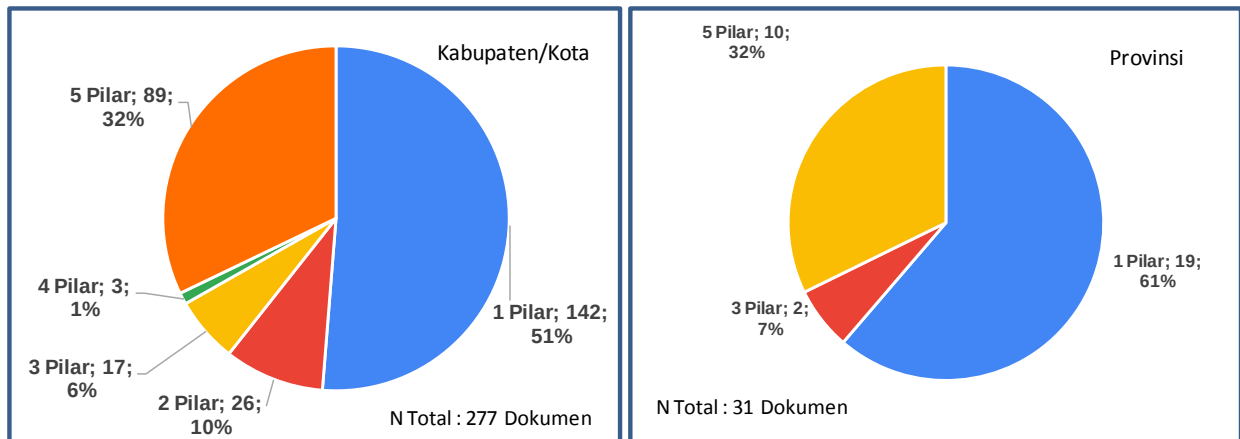
BAB IV Analisis Dokumen GDPK

A. Cakupan Pilar Pembangunan Kependudukan

Cakupan pembangunan kependudukan dalam dokumen GDPK adalah salah satu variabel yang menjadi perhatian dalam analisis isi dokumen GDPK baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah cakupan Pilar dalam Dokumen GDPK untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5.

Jumlah Cakupan Pilar dalam Dokumen GDPK



Terlihat bahwa provinsi dan kabupaten/kota memiliki pola yang sama dalam hal proporsi cakupan pilar GDPK. Mayoritas pilar yang dicakup adalah 1 Pilar yaitu pilar kuantitas, untuk kabupaten/kota sebanyak 142 kabupaten/kota (51 %), sementara untuk provinsi sebanyak 19 provinsi (61 %). Sementara itu, yang berhasil menyusun GDPK 5 pilar sebanyak 89 kabupaten/kota (32) persen dan 10 provinsi (32 %).

Pencapaian penyusunan GDPK 5 Pilar yang berkisar 30 persen merupakan pencapaian yang tidak dapat dianggap sedikit, karena ini merupakan suatu pencapaian yang patut untuk diapresiasi. Meskipun pengelola program GDPK di pemerintah daerah adalah OPD-OPD pengelola program pengendalian penduduk dan KB namun mereka dapat berkolaborasi dengan berbagai sektor terkait untuk sehingga berhasil menyusun dokumen GDPK 5 Pilar.

Tabel 3 menunjukkan rincian cakupan pilar pada dokumen GDPK Provinsi. Terlihat bahwa total dokumen ada 31 karena ada 1 provinsi yang belum menyerahkan dokumen yaitu Banten, sementara itu ada 2 provinsi yang memang belum menyusun dokumen GDPK yaitu Kalimantan Utara dan Papua Barat. Tabel 3 juga menunjukkan pilar pengendalian kuantitas

penduduk mayoritas dicakup oleh dokumen GDPK provinsi, sementara itu pilar yang lain dicakup oleh sekitar 12 atau 10 dokumen GDPK provinsi.

Tabel 3.

Cakupan Pilar dan Pilar yang Dicakup dalam Dokumen GDPK Provinsi

No	Provinsi	Cakupan Pilar	Pilar yang Dicakup				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Aceh	1	1				
2	Sumatera Utara	5	1	1	1	1	1
3	Sumatera Barat	1	1				
4	Riau	5	1	1	1	1	1
5	Jambi	1	1				
6	Sumatera Selatan	1	1				
7	Bengkulu	5	1	1	1	1	1
8	Lampung	5	1	1	1	1	1
9	Bangka Belitung	1	1				
10	Kep. Riau	1	1				
11	DKI Jakarta	1	1				
12	Jawa Barat	3	1	1		1	
13	Jawa Tengah	1	1				
14	DI Yogyakarta	5	1	1	1	1	1
15	Jawa Timur	5	1	1	1	1	1
16	Banten	Tidak Ada					
17	Bali	5	1	1	1	1	1
18	NTB	1	1				
19	NTT	1	1				
20	Kalimantan Barat	1	1				
21	Kalimantan Tengah	1	1				
22	Kalimantan Selatan	5	1	1	1	1	1
23	Kalimantan Timur	1	1				
24	Kalimantan Utara	Belum					
25	Sulawesi Utara	1	1				
26	Sulawesi Tengah	1	1				
27	Sulawesi Selatan	1	1				
28	Sulawesi Tenggara	5	1	1	1	1	1
29	Gorontalo	1	1				
30	Sulawesi Barat	1	1				
31	Maluku	5	1	1	1	1	1
32	Maluku Utara	1	1				
33	Papua	3	1	1		1	
34	Papua Barat	Belum					
TOTAL		31	31	12	10	12	10

Keterangan :

Dokumen Tidak Ada

Belum membuat GDPK

Cakupan pilar yang mayoritas hanya 1 pilar ditengarai karena adanya pengaruh BKKBN sebagai pembina dari pengendalian kuantitas penduduk. Sehingga GDPK oleh pemerintah daerah diasumsikan hanya tanggung jawab serta hanya untuk mengurus sektor pengendalian kuantitas penduduk semata.

Tabel 4 memperlihatkan cakupan pilar dokumen GDPK Kabupaten/Kota per provinsi terlihat bahwa total dokumen yang dapat dievaluasi ada 277 dokumen dari 283 dokumen yang tercatat ada. Walaupun tidak semua dokumen yang tercatat ada dapat dievaluasi, namun

jumlah 277 dokumen sudah cukup untuk dapat dipelajari dan mengetahui pola-pola dokumen GDPK kabupaten/kota.

Tabel 4.

Cakupan Pilar dan Pilar yang Dicakup dalam Dokumen GDPK Kabupaten/Kota per provinsi

No	Provinsi	Jum kab/kota	Melapor sudah Menyusun GDPK	Tercatat ada dokumen GDPK	Dapat dievaluasi	1 Pilar	2 Pilar	3 Pilar	4 Pilar	5 Pilar
1	Aceh	23	14	14	14					14
2	Sumatera Utara	33	15	15	15			1		14
3	Sumatera Barat	19	19	16	13	5	2	1		5
4	Riau	12	12	12	12	4		2	1	5
5	Jambi	11	10	5	5	3	1			1
6	Sumatera Selatan	17	3	3	3					3
7	Bengkulu	10	10	3	3					3
8	Lampung	15	15	15	15	13		1		1
9	Bangka Belitung	7	7	7	7		1			6
10	Kep. Riau	7	1	1	1					1
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	27	18	11	11	3	3	2	1	2
13	Jawa Tengah	35	35	34	34	33				1
14	DI Yogyakarta	5	5	5	5					5
15	Jawa Timur	38	37	30	30	13	2	3		12
16	Banten	8	7	6	6	6				
17	Bali	9	9	9	9	3		1		5
18	NTB	10	10	10	10	9	1			
19	NTT	22	6	4	4	4				
20	Kalimantan Barat	14	14	14	13	7	6			
21	Kalimantan Tengah	14	13	13	13	9	3			1
22	Kalimantan Selatan	13	13							
23	Kalimantan Timur	10	10	10	10	9				1
24	Kalimantan Utara	5	5	5	5	5				
25	Sulawesi Utara	15	9	7	6	1	1		1	3
26	Sulawesi Tengah	13	10							
27	Sulawesi Selatan	24	21	21	20	7	4	6		3
28	Sulawesi Tenggara	17	1	1	1		1			
29	Gorontalo	6	6	6	6	5				1
30	Sulawesi Barat	6	2	2	2	1				1
31	Maluku	11	1	1	1	1				
32	Maluku Utara	10	2	2	2	1	1			
33	Papua	29	2	1	1					1
34	Papua Barat	13	0							
TOTAL		508	342	283	277	142	26	17	3	89

B. Analisis Isi Dokumen

1. *State Of The Art* penyusunan GDPK

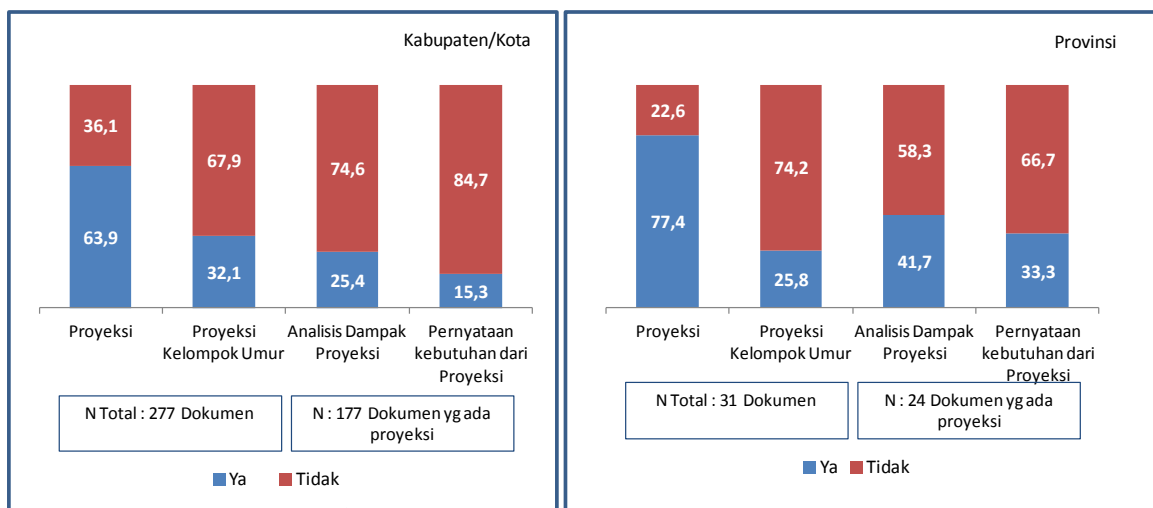
Secara keseluruhan pada bagian pendahuluan baik pada dokumen GDPK Provinsi maupun GDPK kabupaten/kota telah mencerminkan hal tersebut, namun teridentifikasi berdasarkan hasil review, untuk GDPK yang diterbitkan sebelum tahun 2017 mempunyai kata-kata yang seragam pada bagian pendahuluan (seperti template) hingga ke bagian tujuan dan sasaran dari GDPK

2. Proyeksi Penduduk dan analisisnya

GDPK adalah salah satu dokumen acuan perencanaan pembangunan kependudukan jangka panjang sehingga keberadaan proyeksi penduduk beserta analisis dampaknya menjadi hal yang penting. Gambar 6 menunjukkan tentang adanya proyeksi penduduk dalam dokumen GDPK beserta analisis dan dampaknya.

Gambar 6.

Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur serta Analisisnya
pada Dokumen GDPK Provinsi dan Kab/Kota



Gambar 6 menunjukkan bahwa dari dokumen GDPK yang terkumpul ternyata masih ada dokumen GDPK yang tidak mencantumkan proyeksi penduduk dimana untuk provinsi sekitar 22,6 persen dan untuk kabupaten/kota sekitar 36,1 persen. Proyeksi kelompok umur memiliki persentase yang lebih rendah lagi sementara untuk analisis dampak proyeksi kabupaten/kota dan provinsi memiliki pola yang berbeda dimana pada kabupaten/kota, proporsinya jauh lebih rendah dokumen yang mencantumkannya. Sementara itu untuk analisis dan pernyataan kebutuhan dari proyeksi baik provinsi dan kabupaten kota memiliki persentase yang sama-sama tidak tinggi.

Proyeksi penduduk per kelompok umur penting untuk diperhatikan oleh setiap daerah karena struktur penduduk akan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan oleh setiap daerah. Daerah yang memiliki proporsi lansia lebih tinggi dibandingkan daerah lain harus memiliki arah kebijakan kependudukan yang berbeda dengan daerah memiliki proporsi usia produktif lebih banyak. Adanya proyeksi penduduk per kelompok umur maka jumlah penduduk per kelompok umur dapat diperkirakan dimasa depan dengan berpatokan pada

asumsi-asumsi yang ditetapkan dan disepakati dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM dimasa mendatang.

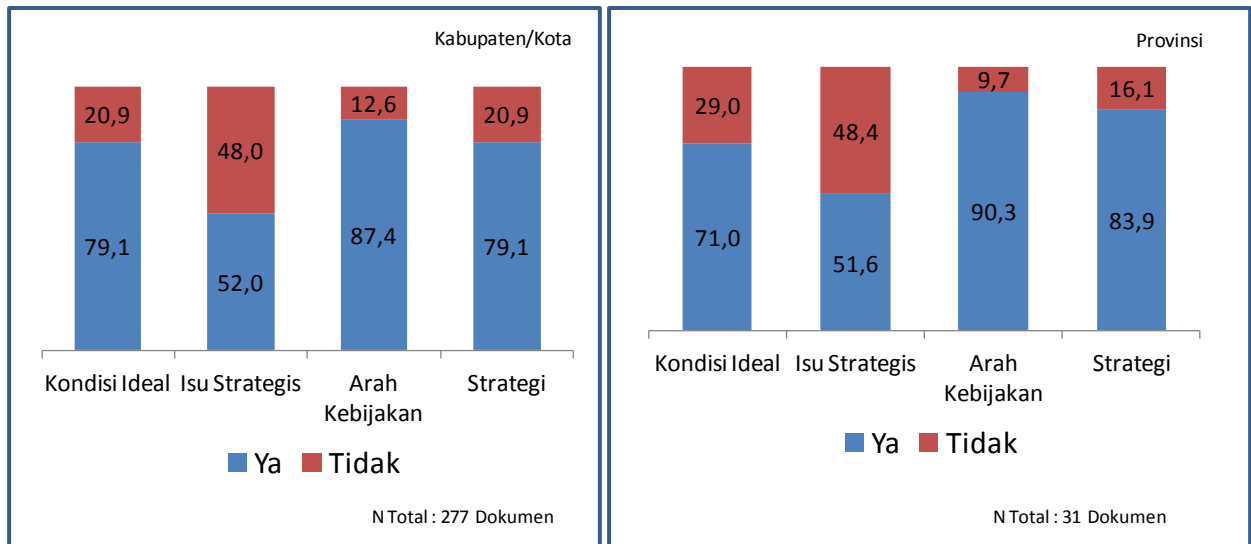
Proyeksi penduduk tentunya tidak hanya deretan angka-angka yang diprediksi pada tahun-tahun mendatang. Jumlah-jumlah yang muncul akan memiliki dampak dan implikasi sehingga perlu untuk diamati dan dianalisis dampak-dampak yang muncul dari jumlah penduduk yang diprediksi tersebut. Dampak-dampak dari jumlah penduduk per kelompok umur antara lain bagaimana kebutuhan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, jumlah vaksin yang dibutuhkan, jumlah perumahan, jumlah sekolah dan seterusnya. Diharapkan dokumen GDPK dapat memberikan analisis mengenai dampak dari proyeksi yang dihasilkan dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai jumlah tertentu dimasa mendatang seperti untuk per 1000 penduduk maka dibutuhkan berapa rumah sakit, berapa fasilitas sekolah, jumlah dokter, jumlah guru dan seterusnya. Adanya analisis tersebut akan membantu para stakeholder untuk memahami pentingnya untuk berkolaborasi bersama mewujudkan dan mendukung pembangunan kependudukan secara bersama-sama dibandingkan hanya bekerja secara sektoral.

3. Kondisi ideal, Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

Baik dokumen provinsi dan dokumen kabupaten kota memiliki pola yang sama untuk keberadaan kondisi ideal, isu strategis, arah kebijakan dan strategi seperti di Gambar 7. Terlihat bahwa isu strategis memiliki angka yang lebih rendah dari pada indikator yang lain, hal ini dapat dimaklumi karena pada panduan sebelumnya tidak ada ketentuan harus menempatkan adanya isu strategis dalam dokumen GDPK. Namun sesungguhnya isu strategis penting untuk dimasukkan dalam dokumen GDPK sebagai "*shopping list*" dari hasil analisis kependudukan yang telah ditampilkan pada bab analisis situasi kependudukan yang ada.

Idealnya analisis kependudukan menghasilkan status kependudukan pada suatu wilayah. Sehingga dapat teridentifikasi mana indikator yang sudah baik, masih kurang dan stagnan, sehingga dapat terlihat dimana masalah-masalah kependudukan yang harus menjadi perhatian. Kemudian dari berbagai masalah yang berhasil diidentifikasi, masalah mana saja yang harus menjadi perhatian dengan cara melakukan analisis prioritas untuk mendapatkan isu strategis. Isu strategis merupakan hasil kesepakatan pemangku kepentingan dari diskusi tim penyusun untuk merumuskan isu-isu yang bersifat strategis dan juga prioritas sehingga arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing daerah.

Gambar 7.
Keberadaan Kondisi ideal, Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi
pada Dokumen GDPK Kabupaten/Kota dan Provinsi



Reviu pada pilar pengendalian kuantitas penduduk menunjukkan bahwa secara umum dokumen GDPK baik provinsi dan kabupaten/kota masih berat pada pilar ini dan program KB. Dokumen masih memiliki kekurangan dalam kesinambungan antara hasil analisis, isu strategis yang ditetapkan hingga kebijakan dan strategi yang diambil sehingga ini merupakan suatu evaluasi yang mana kedepan diharapkan dapat lebih diperbaiki. Perincian reviu kualitatif kondisi ideal, isu strategis, arah dan kebijakan juga direviu dengan hasil sebagai berikut.

REVIU KONDISI IDEAL	REVIU KONDISI ISU STRATEGIS
<i>" Hanya mencantumkan kondisi ideal pada aspek kuantitas"</i> <i>"Bab kondisi ideal berisi uraian mengenai pencapaian daerah"</i> <i>"Hanya terdapat angka berdasarkan "Summary Demographic Indicators" tidak disertai dengan kalimat penjelasan"</i> <i>"Kondisi ideal belum terstate secara jelas, namun sudah menyertakan target per tahun untuk masing2 indikator"</i> <i>"Kondisi ideal hanya memuat target program KB dan fokus pada pilar kuantitatif"</i>	<i>"Ada permasalahan yang disampaikan dalam dokumen tetapi belum didukung dengan data dalam bentuk angka"</i> <i>"isu strategis hanya berupa indikator banggakencana"</i> <i>"isu strategis hanya mencakup kuantitas penduduk, KB, dan pembangunan keluarga"</i> <i>"Berisi analisis SWOT"</i> <i>"tidak secara eksplisit menyebutkan isu strategis pembangunan kependudukan"</i> <i>"Isu belum dijelaskan secara jelas dan komprehensif"</i>
REVIU KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
<i>" bersifat umum tidak spesifik berdasarkan analisis kependudukan"</i> <i>"hanya menguraikan untuk Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga"</i> <i>"tidak sinkron dengan visi misi dan tujuan serta isu strategis kependudukan"</i> <i>"Strategi yang disampaikan masih terlalu umum dan tidak sesuai dengan arah kebijakan"</i> <i>"Uraian belum menyajikan secara strategis dan operasional"</i> <i>"kebijakan masih berkuat di program kependudukan BKKBN belum melibatkan lintas sektor"</i> <i>"Tidak sinkron dengan analisis dan isu strategis / permasalahan yang diajukan"</i>	

4. Roadmap (Peta Jalan)

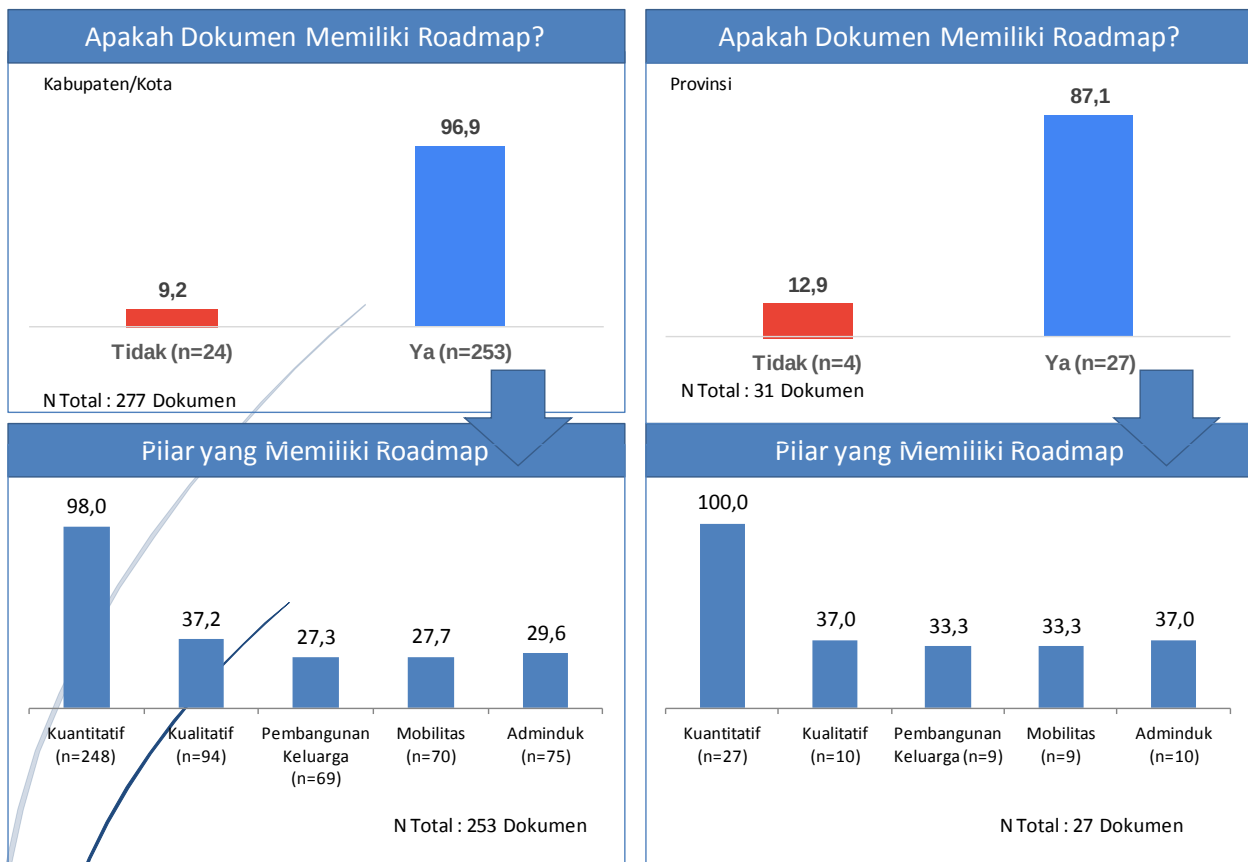
Roadmap (Peta Jalan) adalah suatu alur target-target milestone yang penting untuk dicapai yang bertujuan agar arah pembangunan kependudukan secara berkala dari waktu-ke waktu memiliki acuan keberhasilan yang terpantau sehingga tujuan utama pembangunan kependudukan dalam jangka panjang dapat tercapai dengan baik.

Gambar 8 menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen GDPK sudah memiliki roadmap, namun memang cukup menjadi perhatian ketika masih ada dokumen GDPK yang tidak memiliki roadmap, padahal roadmap merupakan suatu bagian yang penting dalam penyusunan GDPK. Ada 24 dokumen kabupaten/kota yang tidak memiliki roadmap sementara itu ada sekitar 4 dokumen provinsi yang tidak memiliki roadmap. Tentunya dimasa mendatang diharapkan semua dokumen GDPK dapat memiliki roadmap agar tujuan pembangunan kependudukan jangka panjang dapat lebih terarah dan tercapai dengan baik.

Pilar pengendalian kuantitas penduduk merupakan pilar yang paling memiliki roadmap sedangkan pilar-pilar yang lainnya masih belum memiliki roadmap. Hal ini dapat dimaklumi karena pilar kuantitas adalah pilar yang paling banyak terdapat pada dokumen GDPK provinsi dan Kabupaten Kota. Rendahnya pilar mobilitas, administrasi kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan indikasi tidak langsung bahwa pilar-pilar tersebut memang memiliki kesulitan dalam penentuan indikator apa yang seharusnya digunakan. Indikator yang ditetapkan pada dokumen GDPK ini seharusnya merupakan hasil kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di masing-masing wilayah sesuai dengan permasalahan pada tiap pilar yang telah dianalisis pada bab sebelumnya sehingga indikator dan juga targetnya dapat sesuai dengan kondisi yang diinginkan dimasa depan. Berikut adalah hasil rewiu kualitatif dari roadmap pada dokumen GDPK.

Gambar 8.

Keberadaan Roadmap dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada
Dokumen GDPK Kabupaten/Kota dan Provinsi



REVIU TERHADAP ROADMAP

"Tidak disertai dengan strategi/akselerasi pencapaiannya dan fokus pembangunan pada masing-masing periode"

"roadmap tidak untuk semua pilar yang disebutkan ada pada dokumen"

"Tidak jelas indikator dan parameter serta besaran angka target-target yang akan dicapai"

"Untuk Pembangunan Keluarga serta Penataan Data dan Administrasi Kependudukan belum ada capaian jelas yang ingin dicapai"

"Kurang terlihat bagaimana keterlibatan lintas sektor"

"Hanya berisi target (angka) tanpa kebijakan dan focus strategi"

"Roadmap hanya untuk aspek kuantitas saja"

"agak rancu karena roadmap dilakukan per indikator fertilitas dan mortalitas"

"Pilar Mobilitas seharusnya dapat masuk pada pilar pengendalian kuantitas"

"Masih ada target data yang tertulis "xxx"

"Hanya Road Map KB"

"Tidak sinkron dengan bab analisis kependudukan, sehingga tidak menjawab permasalahan yang muncul pada bab analisis kependudukan"

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Sampai pada Desember Tahun 2020 terdapat 283 dokumen kabupaten/kota yang menyerahkan dokumen GDPK, sedangkan provinsi ada 31 dokumen GDPK yang sudah menyerahkan ke BKKBN. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang ternyata hanya 277 dokumen GDPK yang dapat dievaluasi karena ada 3 dokumen yang tidak dapat memenuhi syarat kelengkapan evaluasi. Sementara untuk provinsi ada 31 dokumen GDPK yang dapat dievaluasi.

Secara umum dokumen GDPK provinsi dan kabupaten/kota memiliki kesamaan pola. Kesamaan pola tersebut antara lain pada persentase banyaknya pilar yang dicakup dimana mayoritas pilar yang dicakup, legalitas, SK Tim, proyeksi serta analisisnya, Kondisi ideal, Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi serta yang terakhir adalah roadmap, dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan antara lain :

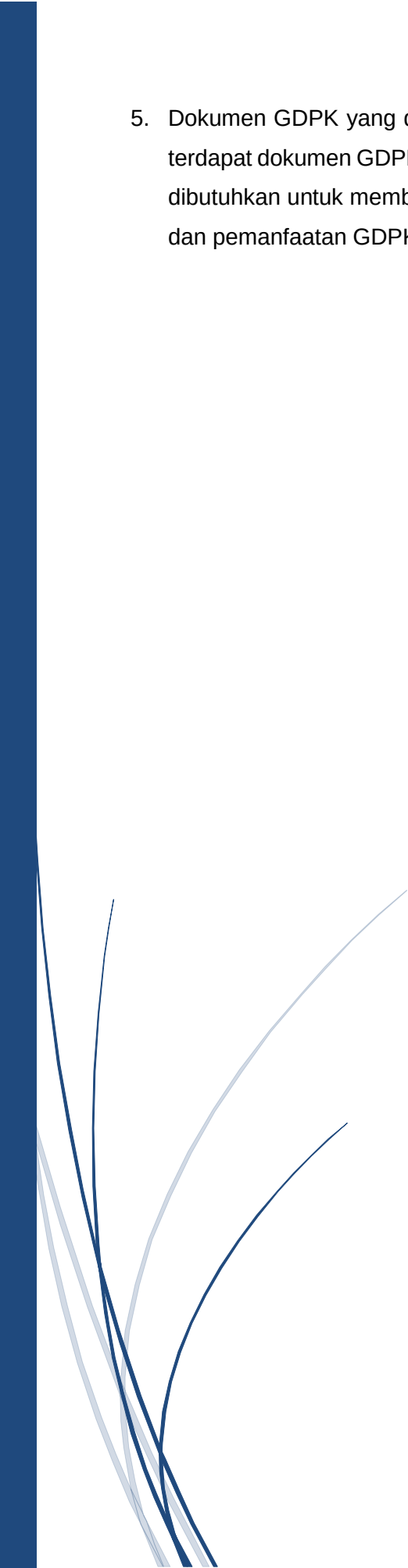
1. Pilar yang dicakup mayoritas hanya 1 Pilar yaitu pilar kuantitas 51 persen Kab/Kota dan 61 persen provinsi, sementara hanya sekitar 32 persen kab/kota dan 32 persen provinsi dari dokumen yang ada berhasil menyusun GDPK 5 Pilar.
2. Masih minimnya legalitas dokumen GDPK yaitu 16 persen untuk kabupaten/kota dan 16 persen untuk provinsi. Ini menunjukkan masih lemahnya pengakuan daerah tentang keberadaan dokumen GDPK sebagai acuan resmi pembangunan kependudukan diwilayahnya.
3. SK Tim penyusun juga memiliki pola yang sama dengan legalitas, walaupun memiliki persentase yang sedikit lebih tinggi (22 persen kabupaten/kota, 42 persen provinsi). Kebanyakan SK Tim yang ada ditandatangani oleh kepala daerah (bupati, walikota dan gubernur), namun ada beberapa anomali seperti ditandatangani oleh kepala perwakilan BKKBN provinsi, Kepala OPD dan bahkan oleh pihak universitas. Sektor-sektor yang terlibat antara lain kesehatan, bappeda, dukcapil, pendidikan, BPS dan seterusnya. Rata-rata sektor yang terlibat berjumlah 7 sektor (kabupaten/kota) dan 8 sektor (provinsi) dengan maksimal sektor terlibat bisa mencapai 17 sektor untuk kabupaten/kota dan 15 sektor untuk provinsi. Rendahnya persentase SK Tim ini menunjukkan bahwa keterlibatan lintas sektor dalam GDPK masih rendah. SK Tim GDPK dan Legalitas GDPK adalah dua

dimensi penting untuk meningkatkan pemanfaatan dokumen GDPK dalam perencanaan pembangunan kependudukan di daerah

4. Analisis kependudukan yang ditampilkan hanya sekedar menampilkan data-data saja tanpa menghubungkannya dengan permasalahan yang harus diprioritaskan dan diselesaikan untuk selanjutnya disepakati dan ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan, strategi serta roadmap pada bab berikutnya.
5. Sebagian besar dokumen masih menitikberatkan pada indikator kuantitas, sementara itu indikator Pembangunan Keluarga, Mobilitas serta Penataan Data dan Administrasi Kependudukan paling sedikit dibahas dan dicantumkan. Serta masih ada beberapa GDPK yang menargetkan suatu indikator dengan tulisan "xxx" untuk pilar-pilar Pembangunan Keluarga, Mobilitas, serta Penataan Data dan Administrasi Kependudukan. Ini memberikan mengindikasikan adanya kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menentukan indikator dan target pada pilar tersebut.

B. REKOMENDASI

1. Bagi dokumen GDPK yang hanya mencakup 1 Pilar untuk meningkatkan cakupan menjadi 5 Pilar sesuai dengan sistematika Panduan GDPK 5 Pilar. Bagi dokumen GDPK yang sudah mencakup 5 Pilar, jika memungkinkan untuk merevitalisasi dokumen GDPK agar lebih sesuai dengan Panduan GDPK 5 Pilar;
2. Kunci penting dalam pemanfaatan dokumen GDPK adalah terletak pada proses penyusunannya yang melibatkan lintas sektor dan juga adanya legalitas yang disahkan oleh kepala daerah agar memiliki landasan hukum resmi yang diakui ditingkat daerah;
3. Kesenambungan antar bab harus diperhatikan lebih lanjut dimana situasi kependudukan, proyeksi penduduk dan kondisi ideal yang diharapkan perlu untuk dianalisis sehingga menghasilkan isu-isu strategis yang disepakati untuk diselesaikan bersama melalui arah kebijakan dan strategi yang sesuai dan dipetakan dalam bentuk pada roadmap pembangunan kependudukan;
4. Indikator-indikator pada tiap pilar perlu untuk mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan tingkat daerah, baik jangka pendek dan jangka panjang. Serta dapat juga disesuaikan dengan komitmen pembangunan secara global seperti pada SGDs 2030. Selain itu diperlukan kesepakatan antar sektor untuk dapat mencapai indikator yang dituangkan dalam bentuk angka kuantitatif yang terukur, sehingga target-target yang tercantum pada dokumen GDPK menjadi jelas.

- 
5. Dokumen GDPK yang diserahkan untuk dilaporkan harus berupa pdf yang utuh dimana terdapat dokumen GDPK, dokumen legalitas dan SK Tim, beserta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk membantu dalam monitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan dan pemanfaatan GDPK.

DAFTAR PUSTAKA

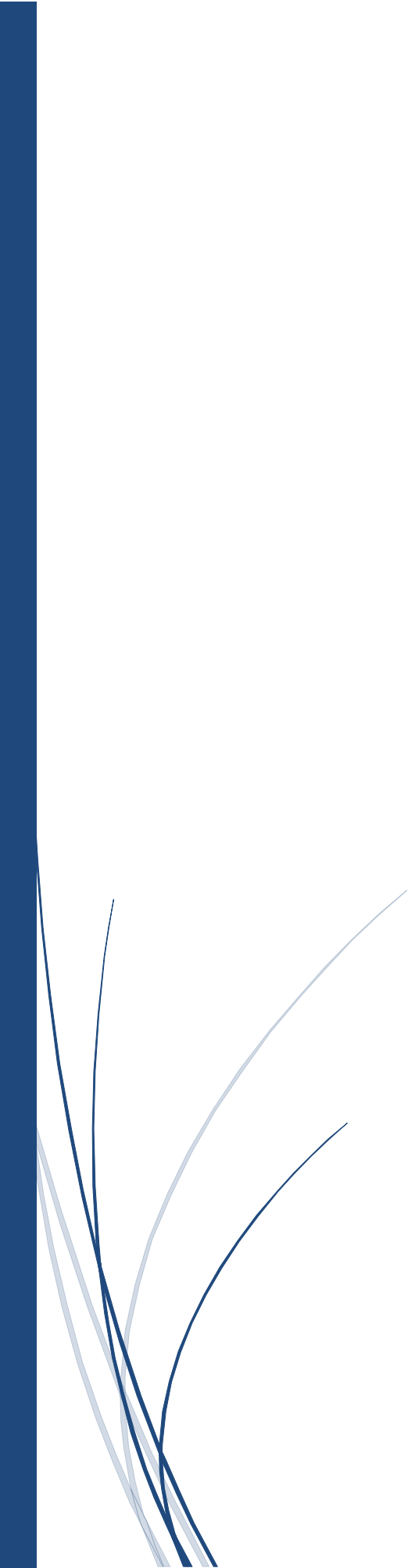
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. Feedback Rekapitulasi Data Penyusunan GDPK Provinsi dan Kabupaten/Kota s.d Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2019
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2020. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129).
- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2011. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 TAHUN 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Presiden Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan



LAMPIRAN

LAMPIRAN : PROVINSI ACEH

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Aceh

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Aceh Barat	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Aceh Barat Daya	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Aceh Besar	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Aceh Tengah	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Aceh Timur	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Aceh Selatan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Aceh Utara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Bener Meriah	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Bireun	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Nagan Raya	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kab. Pidie	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kab. Pidie Jaya	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kota Banda Aceh	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kota Langsa	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Aceh		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Aceh

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Aceh Barat	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	5
2	Kab. Aceh Barat Daya	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
3	Kab. Aceh Besar	-	-	-	-	-
4	Kab. Aceh Tengah	-	-	-	-	-
5	Kab. Aceh Timur	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
6	Kab. Aceh Selatan	-	-	-	-	-
7	Kab. Aceh Utara	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
8	Kab. Bener Meriah	-	-	-	-	-
9	Kab. Bireun	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	5
10	Kab. Nagan Raya	-	-	-	-	-
11	Kab. Pidie	-	-	-	-	-
12	Kab. Pidie Jaya	-	-	-	-	-
13	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	-
14	Kota Langsa	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
Provinsi Aceh		-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI ACEH – LANJUTAN 1

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Aceh

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Aceh Barat	Ya	-	Ya	-
2	Kab. Aceh Barat Daya	Ya	-	-	-
3	Kab. Aceh Besar	-	-	-	-
4	Kab. Aceh Tengah	-	-	-	-
5	Kab. Aceh Timur	Ya	-	-	-
6	Kab. Aceh Selatan	Ya	Ya	Ya	-
7	Kab. Aceh Utara	Ya	-	-	-
8	Kab. Bener Meriah	Ya	-	-	-
9	Kab. Bireun	-	-	-	-
10	Kab. Nagan Raya	Ya	-	-	-
11	Kab. Pidie	Ya	-	-	-
12	Kab. Pidie Jaya	-	-	-	-
13	Kota Banda Aceh	Ya	-	Ya	-
14	Kota Langsa	-	-	-	-
Provinsi Aceh		Ya	-	Ya	Ya

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Aceh

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Aceh Barat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Aceh Barat Daya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
3	Kab. Aceh Besar	-	Ya	Ya	Ya	-
4	Kab. Aceh Tengah	Ya	Ya	Ya	Ya	-
5	Kab. Aceh Timur	Ya	-	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Aceh Selatan	-	Ya	Ya	Ya	-
7	Kab. Aceh Utara	-	Ya	Ya	Ya	-
8	Kab. Bener Meriah	-	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Bireun	Ya	-	Ya	Ya	-
10	Kab. Nagan Raya	-	-	Ya	Ya	-
11	Kab. Pidie	-	-	Ya	Ya	-
12	Kab. Pidie Jaya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
13	Kota Banda Aceh	-	Ya	Ya	Ya	-
14	Kota Langsa	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Aceh		-	-	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI ACEH – LANJUTAN 2

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Aceh

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Aceh Barat	Ya	-	Ya
2	Kab. Aceh Barat Daya	Ya	-	Ya
3	Kab. Aceh Besar	Ya	-	Ya
4	Kab. Aceh Tengah	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Aceh Timur	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Aceh Selatan	-	-	Ya
7	Kab. Aceh Utara	Ya	-	Ya
8	Kab. Bener Meriah	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Bireun	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Nagan Raya	Ya	-	Ya
11	Kab. Pidie	Ya	-	Ya
12	Kab. Pidie Jaya	Ya	-	Ya
13	Kota Banda Aceh	Ya	Ya	Ya
14	Kota Langsa	Ya	Ya	Ya
Provinsi Aceh		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Aceh

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Aceh Barat	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Aceh Barat Daya	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Aceh Besar	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Aceh Tengah	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Aceh Timur	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Aceh Selatan	5	Ya	Ya	-	-	-
7	Kab. Aceh Utara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Bener Meriah	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Bireun	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Nagan Raya	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kab. Pidie	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kab. Pidie Jaya	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kota Banda Aceh	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kota Langsa	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Aceh		5	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Deli Serdang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Humbang Hasundutan	3	Ya	Ya	-	Ya	-
3	Kab. Labuhan Batu	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Labuhan Batu Utara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Tapanuli Utara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Serdang Bedagai	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Tapanuli Selatan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Simalungun	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kota Pematang Siantar	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kota Binjai	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kota Medan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kota Padangsidimpuan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kota Sibolga	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kota Tanjung Balai	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Kota Tebing Tinggi	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Utara		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Deli Serdang	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
2	Kab. Humbang Hasundutan	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
3	Kab. Labuhan Batu	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
4	Kab. Labuhan Batu Utara	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
5	Kab. Tapanuli Utara	Ya	Peraturan Daerah	-	-	-
6	Kab. Serdang Bedagai	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	14
7	Kab. Tapanuli Selatan	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	5
8	Kab. Simalungun	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	16
9	Kota Pematang Siantar	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Walikota	5
10	Kota Binjai	-	-	-	-	-
11	Kota Medan	Ya	Peraturan Gubernur	-	-	-
12	Kota Padangsidimpuan	-	-	Ya	SK Walikota	10
13	Kota Sibolga	Ya	Peraturan Walikota	-	-	-
14	Kota Tanjung Balai	Ya	Peraturan Walikota	Ya	SK Walikota	7
15	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Utara		Ya	Peraturan Gubernur	Ya	Tdk disebutkan	1

LAMPIRAN : PROVINSI SUMATERA UTARA – LANJUTAN 1

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Deli Serdang	Ya	Ya	-	-
2	Kab. Humbang Hasundutan	Ya	Ya	-	-
3	Kab. Labuhan Batu	Ya	Ya	Ya	
4	Kab. Labuhan Batu Utara	Ya	Ya	-	-
5	Kab. Tapanuli Utara	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Serdang Bedagai	Ya	Ya	-	-
7	Kab. Tapanuli Selatan	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Simalungun	Ya	Ya	-	-
9	Kota Pematang Siantar	Ya	Ya	-	-
10	Kota Binjai	Ya	Ya	-	Ya
11	Kota Medan	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kota Padangsidimpuan	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kota Sibolga	Ya	Ya	-	-
14	Kota Tanjung Balai	Ya	Ya	-	-
15	Kota Tebing Tinggi	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Utara		Ya	Ya	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Deli Serdang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Humbang Hasundutan	Ya	-	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Labuhan Batu	Ya	-	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Labuhan Batu Utara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Tapanuli Utara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Serdang Bedagai	Ya	-	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Tapanuli Selatan	Ya	-	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Simalungun	Ya	-	Ya	Ya	Ya
9	Kota Pematang Siantar	-	-	-	-	Ya
10	Kota Binjai	Ya	-	Ya	Ya	Ya
11	Kota Medan	Ya	Ya	Ya	-	Ya
12	Kota Padangsidimpuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kota Sibolga	Ya	-	Ya	Ya	Ya
14	Kota Tanjung Balai	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Kota Tebing Tinggi	Ya	-	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Utara		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI SUMATERA UTARA – LANJUTAN 2

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Deli Serdang	Ya	-	Ya
2	Kab. Humbang Hasundutan	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Labuhan Batu	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Labuhan Batu Utara	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Tapanuli Utara	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Serdang Bedagai	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Tapanuli Selatan	Ya	-	Ya
8	Kab. Simalungun	Ya	Ya	Ya
9	Kota Pematang Siantar	Ya	Ya	Ya
10	Kota Binjai	-	-	Ya
11	Kota Medan	Ya	Ya	Ya
12	Kota Padangsidimpuan	Ya	Ya	Ya
13	Kota Sibolga	Ya	Ya	Ya
14	Kota Tanjung Balai	Ya	-	Ya
15	Kota Tebing Tinggi	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Utara		Ya	-	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Deli Serdang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Humbang Hasundutan	3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Labuhan Batu	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Labuhan Batu Utara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Tapanuli Utara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Serdang Bedagai	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Tapanuli Selatan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Simalungun	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kota Pematang Siantar	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kota Binjai	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kota Medan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kota Padangsidimpuan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kota Sibolga	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kota Tanjung Balai	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Kota Tebing Tinggi	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Utara		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI SUMATERA BARAT

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Agam	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Lima Puluh Kota	2	Ya	-	-	Ya	-
3	Kab. Pesisir Selatan	2	Ya	-	-	Ya	-
4	Kab. Sijunjung	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Solok	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Pasaman	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kota Bukittinggi	1	Ya	-	-	-	-
8	Kota Padang	3	Ya	Ya	-	-	Ya
9	Kota Padang Panjang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kota Pariaman	1	Ya	-	-	-	-
11	Kota Payakumbuh	1	Ya	-	-	-	-
12	Kota Sawahlunto	1	Ya	-	-	-	-
13	Kota Solok	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Barat		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Agam	-	-	Ya	SK Bupati	7
2	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-
3	Kab. Pesisir Selatan	-	-	Ya	SK Bupati	7
4	Kab. Sijunjung	-	-	Ya	SK Bupati	12
5	Kab. Solok	-	-	-	-	-
6	Kab. Pasaman	-	-	Ya	SK Bupati	0
7	Kota Bukittinggi	-	-	Ya	SK Walikota	4
8	Kota Padang	-	-	-	-	-
9	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-
10	Kota Pariaman	-	-	-	-	-
11	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-
12	Kota Sawahlunto	-	-	Ya	SK Walikota	7
13	Kota Solok	-	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Barat		-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SUMATERA BARAT – LANJUTAN 1

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Agam	-	-	-	-
2	Kab. Lima Puluh Kota	Ya	-	-	-
3	Kab. Pesisir Selatan	Ya	-	-	-
4	Kab. Sijunjung	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Solok	Ya	-	-	-
6	Kab. Pasaman	Ya	Ya	Ya	-
7	Kota Bukittinggi	Ya	-	-	-
8	Kota Padang	Ya	Ya	-	-
9	Kota Padang Panjang	Ya	-	-	-
10	Kota Pariaman	Ya	-	-	-
11	Kota Payahkumbuh	Ya	-	-	-
12	Kota Sawahlunto	Ya	-	-	-
13	Kota Solok	Ya	-	-	-
Provinsi Sumatera Barat		-	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Agam	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Lima Puluh Kota	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Pesisir Selatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Sijunjung	-	Ya	Ya	Ya	-
5	Kab. Solok	-	-	-	-	-
6	Kab. Pasaman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kota Bukittinggi	-	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kota Padang	-	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kota Padang Panjang	-	-	Ya	Ya	-
10	Kota Pariaman	-	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kota Payahkumbuh	-	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kota Sawahlunto	-	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kota Solok	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Barat		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI SUMATERA BARAT – LANJUTAN 2

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Agam	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Lima Puluh Kota	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Pesisir Selatan	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Sijunjung	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Solok	-	-	Ya
6	Kab. Pasaman	Ya	Ya	Ya
7	Kota Bukittinggi	-	-	Ya
8	Kota Padang	Ya	Ya	Ya
9	Kota Padang Panjang	Ya	Ya	Ya
10	Kota Pariaman	-	-	Ya
11	Kota Payahkumbuh	-	-	Ya
12	Kota Sawahlunto	-	-	Ya
13	Kota Solok	-	-	Ya
Provinsi Sumatera Barat		-	-	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Agam	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Lima Puluh Kota	2	-	-	-	-	-
3	Kab. Pesisir Selatan	2	Ya	-	-	-	-
4	Kab. Sijunjung	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Solok	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Pasaman	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kota Bukittinggi	1	Ya	Ya	-	-	-
8	Kota Padang	3	Ya	Ya	Ya	-	Ya
9	Kota Padang Panjang	5	Ya	Ya	Ya	-	Ya
10	Kota Pariaman	1	Ya	Ya	-	-	-
11	Kota Payahkumbuh	1	Ya	Ya	-	-	-
12	Kota Sawahlunto	1	Ya	Ya	-	-	-
13	Kota Solok	1	Ya	Ya	-	-	-
Provinsi Sumatera Barat		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI RIAU

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Rokan Hulu	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Indragiri Hulu	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Rokan Hilir	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Indragiri Hilir	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Pelalawan	4	Ya	Ya	-	-	-
6	Kab. Kepulauan Meranti	3	Ya	-	-	Ya	Ya
7	Kab. Kuantan Singingi	1	Ya	-	-	-	-
8	Kab. Kampar	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Siak	1	Ya	-	-	-	-
10	Kab. Bengkalis	1	Ya	-	-	-	-
11	Kota Dumai	1	Ya	-	-	-	-
12	Kota Pekanbaru	3	Ya	Ya	-	Ya	-
Provinsi Riau		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Rokan Hulu	-	-	Ya	SK Bupati	12
2	Kab. Indragiri Hulu	-	-	Ya	SK Bupati	10
3	Kab. Rokan Hilir	-	-	Ya	SK Bupati	10
4	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	-
5	Kab. Pelalawan	Ya	Kep. Bupati	Ya	SK Bupati	13
6	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	Ya	SK OPD	5
7	Kab. Kuantan Singingi	-	-	Ya	SK OPD	1
8	Kab. Kampar	Ya	SK Bupati	Ya	SK Bupati	8
9	Kab. Siak	-	-	-	-	-
10	Kab. Bengkalis	-	-	Ya	SK Bupati	8
11	Kota Dumai	-	-	-	-	-
12	Kota Pekanbaru	-	-	Ya	SK Walikota	12
Provinsi Riau		-	-	Ya	SK Gubernur	11

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-
2	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	-
3	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-
4	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-
5	Kab. Pelalawan	-	-	-	-
6	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-
7	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-
8	Kab. Kampar	-	-	-	-
9	Kab. Siak	-	-	-	-
10	Kab. Bengkalis	-	-	-	-
11	Kota Dumai	-	-	-	-
12	Kota Pekanbaru	-	-	-	-
Provinsi Riau		Ya	Ya	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI RIAU – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Rokan Hulu	-	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Indragiri Hulu	-	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Rokan Hilir	-	Ya	Ya	-	-
4	Kab. Indragiri Hilir	-	-	Ya	Ya	-
5	Kab. Pelalawan	-	Ya	Ya	-	Ya
6	Kab. Kepulauan Meranti	-	Ya	Ya	-	Ya
7	Kab. Kuantan Singingi	-	Ya	Ya	-	Ya
8	Kab. Kampar	-	Ya	-	-	-
9	Kab. Siak	-	Ya	-	-	-
10	Kab. Bengkalis	-	Ya	Ya	-	-
11	Kota Dumai	-	Ya	Ya	-	Ya
12	Kota Pekanbaru	-	Ya	-	-	-
Provinsi Riau		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Rokan Hulu	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Indragiri Hulu	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Rokan Hilir	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Indragiri Hilir	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Pelalawan	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Kepulauan Meranti	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Kuantan Singingi	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Kampar	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Siak	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Bengkalis	Ya	Ya	Ya
11	Kota Dumai	Ya	Ya	Ya
12	Kota Pekanbaru	Ya	Ya	Ya
Provinsi Riau		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Rokan Hulu	5	Ya	Ya	-	Ya	Ya
2	Kab. Indragiri Hulu	5	Ya	Ya	-	Ya	Ya
3	Kab. Rokan Hilir	5	Ya	-	-	-	-
4	Kab. Indragiri Hilir	5	-	-	-	-	-
5	Kab. Pelalawan	4	Ya	-	-	Ya	-
6	Kab. Kepulauan Meranti	3	Ya	-	-	Ya	Ya
7	Kab. Kuantan Singingi	1	Ya	-	-	-	-
8	Kab. Kampar	5	Ya	Ya	-	-	Ya
9	Kab. Siak	1	Ya	-	-	-	-
10	Kab. Bengkalis	1	Ya	Ya	-	-	Ya
11	Kota Dumai	1	Ya	-	-	-	-
12	Kota Pekanbaru	3	Ya	-	-	Ya	-
Provinsi Riau		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI JAMBI

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Batanghari	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Merangin	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	Ya	-	-	-	-
4	Kota Jambi	2	Ya	Ya	-	-	-
5	Kota Sungai Penuh	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Jambi		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Batanghari	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
2	Kab. Merangin	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-
4	Kota Jambi	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
5	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-
Provinsi Jambi		Ya	Peraturan Gubernur	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Batanghari	Ya	Ya	Ya	-
2	Kab. Merangin	-	-	-	-
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	Ya	Ya	-	Ya
4	Kota Jambi	Ya	-	-	-
5	Kota Sungai Penuh	Ya	Ya	Ya	-
Provinsi Jambi		-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI JAMBI – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Batanghari	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Merangin	-	-	Ya	Ya	-
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kota Jambi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kota Sungai Penuh	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Jambi		-	Ya	-	-	-

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Batanghari	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Merangin	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	Ya	Ya	Ya
4	Kota Jambi	Ya	Ya	Ya
5	Kota Sungai Penuh	Ya	Ya	Ya
Provinsi Jambi		Ya	-	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Batanghari	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Merangin	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	Ya	-	-	-	-
4	Kota Jambi	2	Ya	-	-	-	-
5	Kota Sungai Penuh	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Jambi		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kabupaten Musi Banyuasin	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kota Palembang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Lahat	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Selatan		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	-	-
2	Kota Palembang	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Lahat	-	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Selatan		-	-	Ya	SK Gubernur	11

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Musi Banyuasin	Ya	-	Ya	Ya
2	Kota Palembang	Ya	-	-	-
3	Kabupaten Lahat	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Selatan		Ya	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Musi Banyuasin	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kota Palembang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Lahat	-	Ya	-	-	-
Provinsi Sumatera Selatan		-	-	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Musi Banyuasin	Ya	Ya	Ya
2	Kota Palembang	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Lahat	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Selatan		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kabupaten Musi Banyuasin	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kota Palembang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Lahat	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sumatera Selatan		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI BENGKULU

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Kaur	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Kepahiang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Mukomuko	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bengkulu		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Legalitas	Bentuk Legalitas	SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Kaur	Ya	Perka Bappeda	Ya	SK Bupati	9
2	Kab. Kepahiang	-	-	-	-	-
3	Kab. Mukomuko	-	-	-	-	-
Provinsi Bengkulu		Ya	Peraturan Gubernur	Ya	SK Gubernur	11

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Kaur	Ya	Ya	-	-
2	Kab. Kepahiang	Ya	Ya	-	-
3	Kab. Mukomuko	Ya	Ya	-	-
Provinsi Bengkulu		Ya	-	-	Ya

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Kaur	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Kepahiang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Mukomuko	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bengkulu		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Kaur	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Kepahiang	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Mukomuko	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bengkulu		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Kaur	5	Ya	Ya	-	-	Ya
2	Kab. Kepahiang	5	Ya	Ya	-	-	Ya
3	Kab. Mukomuko	5	-	-	-	-	-
Provinsi Bengkulu		5	Ya	-	-	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI LAMPUNG

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Lampung Timur	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Pesawaran	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Tanggamus	1	Ya	-	-	-	-
4	Kab. Tulang Bawang	1	Ya	-	-	-	-
5	Kab. Way Kanan	1	Ya	-	-	-	-
6	Kab. Lampung Barat	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Lampung Selatan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Lampung Tengah	1	Ya	-	-	-	-
9	Kab. Lampung Utara	1	Ya	-	-	-	-
10	Kab. Mesuji	1	Ya	-	-	-	-
11	Kab. Pesisir Barat	1	Ya	-	-	-	-
12	Kab. Pring Sewu	3	Ya	Ya	-	Ya	-
13	Kab. Tulang Bawang Barat	1	Ya	-	-	-	-
14	Kota Bandar Lampung	1	Ya	-	-	-	-
15	Kota Metro	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Lampung		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	-
2	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	-
3	Kab. Tanggamus	-	-	1	SK Bupati	6
4	Kab. Tulang Bawang	-	-	1	SK Bupati	8
5	Kab. Way Kanan	-	-	-	-	-
6	Kab. Lampung Barat	-	-	1	SK Bupati	5
7	Kab. Lampung Selatan	-	-	-	-	-
8	Kab. Lampung Tengah	-	-	1	SK Ka OPD	0
9	Kab. Lampung Utara	-	-	1	SK Ka OPD	2
10	Kab. Mesuji	-	-	-	-	-
11	Kab. Pesisir Barat	-	-	1	SK Ka OPD	3
12	Kab. Pring Sewu	-	-	-	-	-
13	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	1	SK Ka OPD	3
14	Kota Bandar Lampung	-	-	1	SK Walikota	6
15	Kota Metro	-	-	-	-	-
Provinsi Lampung		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Lampung Timur	Ya	-	-	-
2	Kab. Pesawaran	-	-	-	-
3	Kab. Tanggamus	Ya	Ya	-	-
4	Kab. Tulang Bawang	Ya	-	-	-
5	Kab. Way Kanan	Ya	Ya	-	-
6	Kab. Lampung Barat	Ya	-	-	-
7	Kab. Lampung Selatan	-	-	-	-
8	Kab. Lampung Tengah	Ya	-	-	-
9	Kab. Lampung Utara	Ya	Ya	-	-
10	Kab. Mesuji	-	-	-	-
11	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-
12	Kab. Pring Sewu	Ya	-	Ya	Ya
13	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-
14	Kota Bandar Lampung	Ya	-	-	-
15	Kota Metro	Ya	-	-	-
Provinsi Lampung		Ya	-	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI LAMPUNG – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Lampung Timur	-	-	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	Ya
3	Kab. Tanggamus	-	-	-	Ya	Ya
4	Kab. Tulang Bawang	-	-	-	Ya	Ya
5	Kab. Way Kanan	-	-	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Lampung Barat	-	Ya	-	Ya	Ya
7	Kab. Lampung Selatan	Ya	-	-	Ya	Ya
8	Kab. Lampung Tengah	Ya	Ya	Ya	-	Ya
9	Kab. Lampung Utara	-	Ya	-	Ya	Ya
10	Kab. Mesuji	-	-	-	-	-
11	Kab. Pesisir Barat	-	-	Ya	-	Ya
12	Kab. Pring Sewu	Ya	Ya	-	-	-
13	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-
14	Kota Bandar Lampung	-	-	Ya	-	-
15	Kota Metro	-	-	Ya	-	Ya
Provinsi Lampung		-	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Lampung Timur	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Pesawaran	-	-	-
3	Kab. Tanggamus	-	-	Ya
4	Kab. Tulang Bawang	-	Ya	Ya
5	Kab. Way Kanan	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Lampung Barat	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Lampung Selatan	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Lampung Tengah	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Lampung Utara	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Mesuji	Ya	-	-
11	Kab. Pesisir Barat	Ya	Ya	Ya
12	Kab. Pring Sewu	-	-	Ya
13	Kab. Tulang Bawang Barat	Ya	Ya	Ya
14	Kota Bandar Lampung	Ya	Ya	Ya
15	Kota Metro	Ya	Ya	Ya
Provinsi Lampung		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Lampung Timur	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Pesawaran	1	-	-	-	-	-
3	Kab. Tanggamus	1	Ya	-	-	-	-
4	Kab. Tulang Bawang	1	Ya	-	-	-	-
5	Kab. Way Kanan	1	Ya	-	-	-	-
6	Kab. Lampung Barat	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Lampung Selatan	5	Ya	-	-	-	-
8	Kab. Lampung Tengah	1	Ya	-	-	-	-
9	Kab. Lampung Utara	1	Ya	-	-	-	-
10	Kab. Mesuji	1	Ya	-	-	-	-
11	Kab. Pesisir Barat	1	Ya	-	-	-	-
12	Kab. Pring Sewu	3	Ya	-	-	-	-
13	Kab. Tulang Bawang Barat	1	Ya	-	-	-	-
14	Kota Bandar Lampung	1	Ya	-	-	-	-
15	Kota Metro	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Lampung		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI BANGKA BELITUNG

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kabupaten Bangka	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Bangka Barat	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Bangka Selatan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Bangka Tengah	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Belitung	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Belitung Timur	2	Ya	-	-	Ya	-
7	Kota Pangkal Pinang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bangka Belitung		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Bangka	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	2
2	Kabupaten Bangka Barat	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	7
3	Kabupaten Bangka Selatan	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	15
4	Kabupaten Bangka Tengah	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	7
5	Kabupaten Belitung	Ya	Per Gubernur	Ya	SK Bupati	6
6	Kabupaten Belitung Timur	-	-	Ya	SK Bupati	8
7	Kota Pangkal Pinang	Ya	Peraturan Walikota	-	-	-
Provinsi Bangka Belitung		-	-	Ya	SK Gubernur	11

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Bangka	-	-	-	-
2	Kabupaten Bangka Barat	Ya	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Selatan	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Bangka Tengah	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Belitung	Ya	-	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	Ya	Ya	-	-
7	Kota Pangkal Pinang	Ya	-	-	-
Provinsi Bangka Belitung		Ya	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI BANGKA BELITUNG – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Bangka	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Bangka Barat	-	Ya	-	-	Ya
3	Kabupaten Bangka Selatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Bangka Tengah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Belitung	-	Ya	Ya	-	Ya
6	Kabupaten Belitung Timur	-	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kota Pangkal Pinang	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bangka Belitung		-	-	Ya	-	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Bangka	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Bangka Barat	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Bangka Selatan	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Bangka Tengah	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Belitung	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Belitung Timur	Ya	Ya	
7	Kota Pangkal Pinang	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bangka Belitung		Ya	Ya	-

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kabupaten Bangka	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Bangka Barat	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Bangka Selatan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Bangka Tengah	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Belitung	5	Ya	-	-	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	2	-	-	-	-	-
7	Kota Pangkal Pinang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bangka Belitung		1	-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kabupaten Bintan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Kepulauan Riau	1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Bintan	-	-	-	-	-
	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Bintan	Ya	-	-	-
	Provinsi Kepulauan Riau	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Bintan	-	-	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Bintan	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Kepulauan Riau	Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kabupaten Bintan	5	Ya	Ya	-	-	-
	Provinsi Kepulauan Riau	1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
	Provinsi DKI Jakarta	1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
	Provinsi DKI Jakarta	1	Peraturan Gubernur	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
	Provinsi DKI Jakarta	Ya	Ya	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
	Provinsi DKI Jakarta	-	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
	Provinsi DKI Jakarta	Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
	Provinsi DKI Jakarta	1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA BARAT

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Jawa Barat

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Bandung Barat	2	Ya	-	-	Ya	-
2	Kab. Bekasi	3	Ya	Ya	-	Ya	-
3	Kab. Ciamis	2	Ya	-	-	Ya	-
4	Kab. Karawang	2	Ya	-	-	Ya	-
5	Kab. Kuningan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Pangandaran	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Purwakarta	1	Ya	-	-	-	-
8	Kota Banjar	4	Ya	Ya	-	Ya	Ya
9	Kota Bogor	3	Ya	Ya	Ya	-	-
10	Kota Sukabumi	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kota Tasikmalaya	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Jawa Barat		3	Ya	Ya	-	Ya	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Barat

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-
2	Kab. Bekasi	-	-	-	-	-
3	Kab. Ciamis	-	-	-	-	-
4	Kab. Karawang	-	-	-	-	-
5	Kab. Kuningan	-	-	-	-	-
6	Kab. Pangandaran	-	-	-	-	-
7	Kab. Purwakarta	-	-	-	-	-
8	Kota Banjar	-	-	-	-	-
9	Kota Bogor	-	-	-	-	-
10	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-
11	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Barat		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Barat

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Bandung Barat	-	-	-	-
2	Kab. Bekasi	Ya	-	-	-
3	Kab. Ciamis	Ya	-	-	-
4	Kab. Karawang	-	-	-	-
5	Kab. Kuningan	Ya	Ya	-	-
6	Kab. Pangandaran	-	-	-	-
7	Kab. Purwakarta	Ya	Ya	-	-
8	Kota Banjar	Ya	-	-	-
9	Kota Bogor	-	-	-	-
10	Kota Sukabumi	Ya	-	-	-
11	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-
Provinsi Jawa Barat		Ya	Ya	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA BARAT - LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Barat

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Bandung Barat	-	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Bekasi	-	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Ciamis	-	Ya	Ya	Ya	-
4	Kab. Karawang	-	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Kuningan	-	Ya	Ya	Ya	-
6	Kab. Pangandaran	-	Ya	Ya	Ya	-
7	Kab. Purwakarta	-	Ya	Ya	Ya	-
8	Kota Banjar	-	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kota Bogor	-	Ya	Ya	Ya	-
10	Kota Sukabumi	-	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kota Tasikmalaya	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Jawa Barat		-	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Barat

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Bandung Barat	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Bekasi	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Ciamis	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Karawang	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Kuningan	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Pangandaran	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Purwakarta	Ya	Ya	Ya
8	Kota Banjar	Ya	Ya	Ya
9	Kota Bogor	Ya	Ya	Ya
10	Kota Sukabumi	Ya	Ya	Ya
11	Kota Tasikmalaya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Jawa Barat		-	-	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Barat

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Bandung Barat	2	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Bekasi	3	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Ciamis	2	Ya	-	-	-	-
4	Kab. Karawang	2	Ya	-	-	-	-
5	Kab. Kuningan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Pangandaran	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Purwakarta	1	Ya	-	-	-	-
8	Kota Banjar	4	Ya	-	-	-	-
9	Kota Bogor	3	Ya	-	-	-	-
10	Kota Sukabumi	5	Ya	Ya	Ya	-	Ya
11	Kota Tasikmalaya	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Jawa Barat		3	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kabupaten Banyumas	1	Ya	-	-	-	-
2	Kabupaten Kendal	1	Ya	-	-	-	-
3	Kabupaten Sukoharjo	1	Ya	-	-	-	-
4	Kabupaten Banjarnegara	1	Ya	-	-	-	-
5	Kabupaten Batang	1	Ya	-	-	-	-
6	Kabupaten Blora	1	Ya	-	-	-	-
7	Kabupaten Boyolali	1	Ya	-	-	-	-
8	Kabupaten Brebes	1	Ya	-	-	-	-
9	Kabupaten Cilacap	1	Ya	-	-	-	-
10	Kabupaten Demak	1	Ya	-	-	-	-
11	Kabupaten Grobogan	1	Ya	-	-	-	-
12	Kabupaten Jepara	1	Ya	-	-	-	-
13	Kabupaten Karanganyar	1	Ya	-	-	-	-
14	Kabupaten Kebumen	1	Ya	-	-	-	-
15	Kabupaten Klaten	1	Ya	-	-	-	-
16	Kabupaten Kudus	1	Ya	-	-	-	-
17	Kabupaten Magelang	1	Ya	-	-	-	-
18	Kabupaten Pati	1	Ya	-	-	-	-
19	Kabupaten Pekalongan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Kabupaten Pemalang	1	Ya	-	-	-	-
21	Kabupaten Purbalingga	1	Ya	-	-	-	-
22	Kabupaten Purworejo	1	Ya	-	-	-	-
23	Kabupaten Rembang	1	Ya	-	-	-	-
24	Kabupaten Semarang	1	Ya	-	-	-	-
25	Kabupaten Sragen	1	Ya	-	-	-	-
26	Kabupaten Temanggung	1	Ya	-	-	-	-
27	Kabupaten Wonogiri	1	Ya	-	-	-	-
28	Kabupaten Wonosobo	1	Ya	-	-	-	-
29	Kota Magelang	1	Ya	-	-	-	-
30	Kota Pekalongan	1	Ya	-	-	-	-
31	Kota Salatiga	1	Ya	-	-	-	-
32	Kota Semarang	1	Ya	-	-	-	-
33	Kota Surakarta	1	Ya	-	-	-	-
34	Kota Tegal	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah		1	Ya				

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TENGAH – LANJUTAN 1

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Banyumas	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Kendal	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Sukoharjo	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Banjarnegara	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Batang	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Blora	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Boyolali	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Brebes	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Cilacap	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Demak	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Grobogan	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Jepara	-	-	-	-	-
13	Kabupaten Karanganyar	-	-	-	-	-
14	Kabupaten Kebumen	-	-	-	-	-
15	Kabupaten Klaten	-	-	-	-	-
16	Kabupaten Kudus	-	-	-	-	-
17	Kabupaten Magelang	-	-	-	-	-
18	Kabupaten Pati	-	-	-	-	-
19	Kabupaten Pekalongan	-	-	-	-	-
20	Kabupaten Pemalang	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Purbalingga	-	-	-	-	-
22	Kabupaten Purworejo	-	-	-	-	-
23	Kabupaten Rembang	-	-	-	-	-
24	Kabupaten Semarang	-	-	-	-	-
25	Kabupaten Sragen	-	-	-	-	-
26	Kabupaten Temanggung	-	-	-	-	-
27	Kabupaten Wonogiri	-	-	-	-	-
28	Kabupaten Wonosobo	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
29	Kota Magelang	-	-	-	-	-
30	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-
31	Kota Salatiga	-	-	-	-	-
32	Kota Semarang	-	-	-	-	-
33	Kota Surakarta	-	-	-	-	-
34	Kota Tegal	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah		-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TENGAH – LANJUTAN 2

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Banyumas	-	-	-	-
2	Kabupaten Kendal	-	-	-	-
3	Kabupaten Sukoharjo	-	-	-	-
4	Kabupaten Banjarnegara	-	-	-	-
5	Kabupaten Batang	-	-	-	-
6	Kabupaten Blora	-	-	-	-
7	Kabupaten Boyolali	-	-	-	-
8	Kabupaten Brebes	Ya	Ya	-	-
9	Kabupaten Cilacap	-	-	-	-
10	Kabupaten Demak	-	-	-	-
11	Kabupaten Grobogan	-	-	-	-
12	Kabupaten Jepara	-	-	-	-
13	Kabupaten Karanganyar	-	-	-	-
14	Kabupaten Kebumen	-	-	-	-
15	Kabupaten Klaten	-	-	-	-
16	Kabupaten Kudus	Ya	Ya	-	-
17	Kabupaten Magelang	-	-	-	-
18	Kabupaten Pati	Ya	Ya	-	-
19	Kabupaten Pekalongan	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Kabupaten Pemalang	-	-	-	Ya
21	Kabupaten Purbalingga	-	-	-	-
22	Kabupaten Purworejo	-	-	-	-
23	Kabupaten Rembang	-	-	-	-
24	Kabupaten Semarang	Ya	-	-	-
25	Kabupaten Sragen	-	-	-	-
26	Kabupaten Temanggung	-	-	-	-
27	Kabupaten Wonogiri	-	-	-	-
28	Kabupaten Wonosobo	-	-	-	-
29	Kota Magelang	Ya	Ya	-	-
30	Kota Pekalongan	-	-	-	-
31	Kota Salatiga	Ya	Ya	-	-
32	Kota Semarang	Ya	Ya	-	-
33	Kota Surakarta	Ya	Ya	-	-
34	Kota Tegal	-	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah		-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TENGAH – LANJUTAN 3

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Banyumas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Kendal	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Sukoharjo	Ya	Ya			
4	Kabupaten Banjarnegara	Ya	Ya		Ya	Ya
5	Kabupaten Batang	Ya	Ya	Ya		
6	Kabupaten Blora	Ya	Ya			
7	Kabupaten Boyolali	Ya	Ya			
8	Kabupaten Brebes	Ya	Ya			Ya
9	Kabupaten Cilacap	Ya	Ya			
10	Kabupaten Demak	Ya	Ya			
11	Kabupaten Grobogan	Ya	Ya			
12	Kabupaten Jepara	Ya	Ya			
13	Kabupaten Karanganyar	Ya	Ya			
14	Kabupaten Kebumen	Ya	Ya			Ya
15	Kabupaten Klaten	Ya	Ya			
16	Kabupaten Kudus	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
17	Kabupaten Magelang	Ya	Ya			
18	Kabupaten Pati	Ya	Ya			
19	Kabupaten Pekalongan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Kabupaten Pemalang	Ya	Ya			Ya
21	Kabupaten Purbalingga	Ya	Ya			
22	Kabupaten Purworejo	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
23	Kabupaten Rembang	Ya	Ya			
24	Kabupaten Semarang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
25	Kabupaten Sragen	Ya	Ya			
26	Kabupaten Temanggung	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
27	Kabupaten Wonogiri	Ya	Ya			Ya
28	Kabupaten Wonosobo	Ya	Ya	Ya	Ya	
29	Kota Magelang	Ya	Ya			Ya
30	Kota Pekalongan	Ya	Ya	Ya		Ya
31	Kota Salatiga	Ya	Ya			
32	Kota Semarang	Ya	Ya			
33	Kota Surakarta	Ya	Ya			
34	Kota Tegal	Ya	Ya	Ya		Ya
Provinsi Jawa Tengah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TENGAH – LANJUTAN 4

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Banyumas	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Kendal	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Sukoharjo	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Banjarnegara	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Batang	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Blora	Ya	Ya	Ya
7	Kabupaten Boyolali	Ya	Ya	-
8	Kabupaten Brebes	Ya	Ya	Ya
9	Kabupaten Cilacap	Ya	Ya	Ya
10	Kabupaten Demak	Ya	Ya	Ya
11	Kabupaten Grobogan	Ya	Ya	Ya
12	Kabupaten Jepara	Ya	Ya	Ya
13	Kabupaten Karanganyar	Ya	Ya	Ya
14	Kabupaten Kebumen	Ya	Ya	Ya
15	Kabupaten Klaten	Ya	Ya	Ya
16	Kabupaten Kudus	Ya	Ya	Ya
17	Kabupaten Magelang	Ya	Ya	Ya
18	Kabupaten Pati	Ya	Ya	Ya
19	Kabupaten Pekalongan	Ya	Ya	Ya
20	Kabupaten Pemalang	Ya	Ya	Ya
21	Kabupaten Purbalingga	Ya	Ya	Ya
22	Kabupaten Purworejo	Ya	Ya	Ya
23	Kabupaten Rembang	Ya	Ya	Ya
24	Kabupaten Semarang	Ya	Ya	Ya
25	Kabupaten Sragen	Ya	Ya	Ya
26	Kabupaten Temanggung	Ya	-	Ya
27	Kabupaten Wonogiri	Ya	Ya	Ya
28	Kabupaten Wonosobo	Ya	Ya	Ya
29	Kota Magelang	Ya	Ya	-
30	Kota Pekalongan	Ya	Ya	Ya
31	Kota Salatiga	Ya	Ya	Ya
32	Kota Semarang	Ya	Ya	Ya
33	Kota Surakarta	Ya	Ya	Ya
34	Kota Tegal	Ya	Ya	Ya
Provinsi Jawa Tengah		Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TENGAH – LANJUTAN 5

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kabupaten Banyumas	1	Ya	-	-	-	-
2	Kabupaten Kendal	1	Ya	-	-	-	-
3	Kabupaten Sukoharjo	1	Ya	-	-	-	-
4	Kabupaten Banjarnegara	1	Ya	-	-	-	-
5	Kabupaten Batang	1	Ya	-	-	-	-
6	Kabupaten Blora	1	Ya	-	-	-	-
7	Kabupaten Boyolali	1	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Brebes	1	Ya	-	-	-	-
9	Kabupaten Cilacap	1	Ya	-	-	-	-
10	Kabupaten Demak	1	Ya	-	-	-	-
11	Kabupaten Grobogan	1	Ya	-	-	-	-
12	Kabupaten Jepara	1	Ya	-	-	-	-
13	Kabupaten Karanganyar	1	Ya	-	-	-	-
14	Kabupaten Kebumen	1	Ya	-	-	-	-
15	Kabupaten Klaten	1	Ya	-	-	-	-
16	Kabupaten Kudus	1	Ya	-	-	-	-
17	Kabupaten Magelang	1	Ya	-	-	-	-
18	Kabupaten Pati	1	Ya	-	-	-	-
19	Kabupaten Pekalongan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Kabupaten Pemalang	1	Ya	-	-	-	-
21	Kabupaten Purbalingga	1	Ya	-	-	-	-
22	Kabupaten Purworejo	1	Ya	-	-	-	-
23	Kabupaten Rembang	1	Ya	-	-	-	-
24	Kabupaten Semarang	1	-	-	-	-	-
25	Kabupaten Sragen	1	Ya	-	-	-	-
26	Kabupaten Temanggung	1	Ya	-	-	-	-
27	Kabupaten Wonogiri	1	Ya	-	-	-	-
28	Kabupaten Wonosobo	1	Ya	-	-	-	-
29	Kota Magelang	1	-	-	-	-	-
30	Kota Pekalongan	1	Ya	-	-	-	-
31	Kota Salatiga	1	Ya	-	-	-	-
32	Kota Semarang	1	Ya	-	-	-	-
33	Kota Surakarta	1	Ya	-	-	-	-
34	Kota Tegal	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI DI YOGYAKARTA

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi DI Yogyakarta

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Bantul	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Gunung Kidul	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Kulon Progo	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Sleman	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kota Yogyakarta	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi DIY		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi DIY

No	Kab/Kota	Legalitas	Bentuk Legalitas	SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Bantul	-	-	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
4	Kab. Sleman	-	-	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-
Provinsi DIY		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi DI Yogyakarta

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Bantul	Ya	-	Ya	-
2	Kab. Gunung Kidul	Ya	-	Ya	-
3	Kab. Kulon Progo	Ya	-	Ya	-
4	Kab. Sleman	Ya	-	Ya	-
5	Kota Yogyakarta	Ya	-	-	-
Provinsi DIY		-	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi DI Yogyakarta

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Bantul	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Gunung Kidul	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Kulon Progo	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Sleman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kota Yogyakarta	Ya	Ya	-	-	Ya
Provinsi DIY		Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI DI YOGYAKARTA – LANJUTAN

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi DI Yogyakarta

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Bantul	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Gunung Kidul	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Kulon Progo	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Sleman	Ya	Ya	Ya
5	Kota Yogyakarta	-	Ya	Ya
Provinsi DIY		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi DI Yogyakarta

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Bantul	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Gunung Kidul	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Kulon Progo	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Sleman	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kota Yogyakarta	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi DIY		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kabupaten Sampang	1	Ya	-	-	-	-
2	Kabupaten Sumenep	1	Ya	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangkalan	1	Ya	-	-	-	-
4	Kabupaten Banyuwangi	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Bojonegoro	1	Ya	-	-	-	-
6	Kabupaten Bondowoso	1	Ya	-	-	-	-
7	Kabupaten Gresik	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kabupaten Jember	1	Ya	-	-	-	-
9	Kabupaten Jombang	1	Ya	-	-	-	-
10	Kabupaten Kediri	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kabupaten Lumajang	2	Ya	-	Ya	-	-
12	Kabupaten Magetan	1	Ya	-	-	-	-
13	Kabupaten Malang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kabupaten Mojokerto	1	Ya	-	-	-	-
15	Kabupaten Nganjuk	1	Ya	-	-	-	-
16	Kabupaten Ngawi	3	Ya	Ya	Ya	-	-
17	Kabupaten Pacitan	2	Ya	-	Ya	-	-
18	Kabupaten Pasuruan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
19	Kabupaten Sidoarjo	1	Ya	-	-	-	-
20	Kabupaten Situbondo	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
21	Kabupaten Trenggalek	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
22	Kabupaten Tuban	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
23	Kabupaten Tulungagung	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
24	Kota Batu	3	Ya	Ya	Ya	-	-
25	Kota Blitar	1	Ya	-	-	-	-
26	Kota Kediri	1	Ya	-	-	-	-
27	Kota Madiun	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
28	Kota Malang	3	Ya	Ya	-	-	Ya
29	Kota Probolinggo	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
30	Kota Surabaya	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Jawa Timur		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TIMUR – LANJUTAN 1

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Sampang	Ya	SK OPD	-	-	-
2	Kabupaten Sumenep	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangkalan	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Banyuwangi	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Bojonegoro	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Bondowoso	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Gresik	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Jember	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Jombang	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Lumajang	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Magetan	-	-	-	-	-
13	Kabupaten Malang	-	-	-	-	-
14	Kabupaten Mojokerto	-	-	-	-	-
15	Kabupaten Nganjuk	-	-	-	-	-
16	Kabupaten Ngawi	-	-	-	-	-
17	Kabupaten Pacitan	-	-	-	-	-
18	Kabupaten Pasuruan	-	-	-	-	-
19	Kabupaten Sidoarjo	-	-	-	-	-
20	Kabupaten Situbondo	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Trenggalek	-	-	-	-	-
22	Kabupaten Tuban	-	-	-	-	-
23	Kabupaten Tulungagung	-	-	-	-	-
24	Kota Batu	-	-	-	-	-
25	Kota Blitar	-	-	-	-	-
26	Kota Kediri	-	-	-	-	-
27	Kota Madiun	-	-	-	-	-
28	Kota Malang	-	-	-	-	-
29	Kota Probolinggo	-	-	-	-	-
30	Kota Surabaya	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Timur		-	-	Ya	SK Gubernur	1

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TIMUR – LANJUTAN 2

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Sampang	Ya	-	Ya	-
2	Kabupaten Sumenep	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangkalan	-	-	-	-
4	Kabupaten Banyuwangi	-	-	-	-
5	Kabupaten Bojonegoro	-	-	-	-
6	Kabupaten Bondowoso	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kabupaten Gresik	Ya	Ya	-	-
8	Kabupaten Jember	Ya	Ya	-	-
9	Kabupaten Jombang	-	-	-	-
10	Kabupaten Kediri	Ya	Ya	-	-
11	Kabupaten Lumajang	-	-	-	-
12	Kabupaten Magetan	Ya	Ya	-	-
13	Kabupaten Malang	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kabupaten Mojokerto	Ya	Ya	-	-
15	Kabupaten Nganjuk	-	-	-	-
16	Kabupaten Ngawi	Ya	Ya	Ya	Ya
17	Kabupaten Pacitan	-	-	-	-
18	Kabupaten Pasuruan	Ya	Ya	-	-
19	Kabupaten Sidoarjo	-	-	-	-
20	Kabupaten Situbondo	Ya	Ya	-	-
21	Kabupaten Trenggalek	Ya	Ya	-	-
22	Kabupaten Tuban	Ya	-	Ya	Ya
23	Kabupaten Tulungagung	Ya	Ya	Ya	Ya
24	Kota Batu	-	-	-	-
25	Kota Blitar	Ya	Ya	-	-
26	Kota Kediri	Ya	Ya	-	-
27	Kota Madiun	Ya	Ya	-	-
28	Kota Malang	-	-	-	-
29	Kota Probolinggo	Ya	-	Ya	Ya
30	Kota Surabaya	Ya	Ya	-	-
Provinsi Jawa Timur		-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TIMUR – LANJUTAN 3

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Sampang	-	-	-	-	Ya
2	Kabupaten Sumenep	-	-	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Bangkalan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Banyuwangi	Ya	-	-	-	-
5	Kabupaten Bojonegoro	Ya	Ya	-	-	Ya
6	Kabupaten Bondowoso	Ya	Ya	-	-	Ya
7	Kabupaten Gresik	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Jember	Ya	Ya	-	-	Ya
9	Kabupaten Jombang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kabupaten Kediri	Ya	Ya	-	-	Ya
11	Kabupaten Lumajang	-	Ya	-	-	-
12	Kabupaten Magetan	Ya	Ya	-	-	-
13	Kabupaten Malang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kabupaten Mojokerto	Ya	Ya	-	-	Ya
15	Kabupaten Nganjuk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
16	Kabupaten Ngawi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
17	Kabupaten Pacitan	Ya	Ya	-	-	-
18	Kabupaten Pasuruan	Ya	Ya	-	-	-
19	Kabupaten Sidoarjo	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Kabupaten Situbondo	Ya	Ya	-	-	Ya
21	Kabupaten Trenggalek	-	-	-	-	Ya
22	Kabupaten Tuban	Ya	Ya	-	-	Ya
23	Kabupaten Tulungagung	Ya	-	-	-	Ya
24	Kota Batu	-	Ya	-	-	-
25	Kota Blitar	-	-	-	-	-
26	Kota Kediri	-	-	-	-	-
27	Kota Madiun	Ya	Ya	-	-	-
28	Kota Malang	-	-	-	-	-
29	Kota Probolinggo	-	-	-	-	Ya
30	Kota Surabaya	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Timur		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TIMUR – LANJUTAN 4

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Sampang	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Sumenep	-	-	-
3	Kabupaten Bangkalan	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Banyuwangi	Ya	Ya	-
5	Kabupaten Bojonegoro	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Bondowoso	Ya	Ya	Ya
7	Kabupaten Gresik	Ya	Ya	Ya
8	Kabupaten Jember	Ya	Ya	Ya
9	Kabupaten Jombang	Ya	Ya	-
10	Kabupaten Kediri	Ya	Ya	Ya
11	Kabupaten Lumajang	Ya	Ya	Ya
12	Kabupaten Magetan	Ya	Ya	Ya
13	Kabupaten Malang	Ya	Ya	Ya
14	Kabupaten Mojokerto	Ya	Ya	Ya
15	Kabupaten Nganjuk	Ya	Ya	-
16	Kabupaten Ngawi	Ya	Ya	Ya
17	Kabupaten Pacitan	Ya	Ya	Ya
18	Kabupaten Pasuruan	Ya	Ya	Ya
19	Kabupaten Sidoarjo	Ya	Ya	Ya
20	Kabupaten Situbondo	Ya	Ya	Ya
21	Kabupaten Trenggalek	Ya	Ya	Ya
22	Kabupaten Tuban	Ya	Ya	-
23	Kabupaten Tulungagung	Ya	Ya	Ya
24	Kota Batu	Ya	Ya	Ya
25	Kota Blitar	Ya	Ya	Ya
26	Kota Kediri	Ya	Ya	Ya
27	Kota Madiun	Ya	Ya	Ya
28	Kota Malang	Ya	Ya	Ya
29	Kota Probolinggo	Ya	Ya	Ya
30	Kota Surabaya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Jawa Timur		Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI JAWA TIMUR – LANJUTAN 5

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map			
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Admindak
1	Kabupaten Sampang	1	Ya	-	-	-
2	Kabupaten Sumenep	1	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangkalan	1	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Banyuwangi	5	-	-	-	-
5	Kabupaten Bojonegoro	1	Ya	-	-	-
6	Kabupaten Bondowoso	1	Ya	-	-	-
7	Kabupaten Gresik	5	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kabupaten Jember	1	Ya	Ya	-	-
9	Kabupaten Jombang	1	-	-	-	-
10	Kabupaten Kediri	5	Ya	Ya	-	-
11	Kabupaten Lumajang	2	Ya	-	Ya	-
12	Kabupaten Magetan	1	Ya	-	-	-
13	Kabupaten Malang	5	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kabupaten Mojokerto	1	Ya	Ya	-	-
15	Kabupaten Nganjuk	1	-	-	-	-
16	Kabupaten Ngawi	3	Ya	-	-	-
17	Kabupaten Pacitan	2	Ya	-	Ya	-
18	Kabupaten Pasuruan	5	Ya	Ya	-	-
19	Kabupaten Sidoarjo	1	Ya	-	Ya	-
20	Kabupaten Situbondo	5	Ya	Ya	-	Ya
21	Kabupaten Trenggalek	5	Ya	Ya	-	-
22	Kabupaten Tuban	5	-	-	-	-
23	Kabupaten Tulungagung	5	Ya	Ya	Ya	Ya
24	Kota Batu	3	-	-	-	-
25	Kota Blitar	1	Ya	-	-	-
26	Kota Kediri	1	Ya	-	-	-
27	Kota Madiun	5	Ya	Ya	Ya	Ya
28	Kota Malang	3	Ya	Ya	-	Ya
29	Kota Probolinggo	5	Ya	Ya	Ya	Ya
30	Kota Surabaya	5	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Jawa Timur		5	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI BANTEN

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminder
1	Kabupaten Serang	1	Ya	-	-	-	-
2	Kabupaten Tangerang	1	Ya	-	-	-	-
3	Kota Cilegon	1	Ya	-	-	-	-
4	Kota Serang	1	Ya	-	-	-	-
5	Kota Tangerang	1	Ya	-	-	-	-
6	Kota Tangerang Selatan	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Banten		-	-	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Serang	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Tangerang	-	-	-	-	-
3	Kota Cilegon	-	-	-	-	-
4	Kota Serang	-	-	-	-	-
5	Kota Tangerang	-	-	-	-	-
6	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-
Provinsi Banten		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Serang	Ya	-	-	-
2	Kabupaten Tangerang	Ya	-	-	-
3	Kota Cilegon	Ya	-	-	-
4	Kota Serang	Ya	-	-	-
5	Kota Tangerang	Ya	-	-	Ya
6	Kota Tangerang Selatan	Ya	-	-	-
Provinsi Banten		-	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Serang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Tangerang	-	Ya	Ya	Ya	-
3	Kota Cilegon	-	Ya	-	-	-
4	Kota Serang	-	Ya	Ya	Ya	-
5	Kota Tangerang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kota Tangerang Selatan	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Banten		-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI BANTEN – LANJUTAN

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Serang	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Tangerang	Ya	Ya	Ya
3	Kota Cilegon	Ya	Ya	Ya
4	Kota Serang	Ya	Ya	Ya
5	Kota Tangerang	Ya	Ya	Ya
6	Kota Tangerang Selatan	Ya	Ya	Ya
Provinsi Banten		-	-	-

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kabupaten Serang	1	Ya	-	-	-	-
2	Kabupaten Tangerang	1	Ya	-	-	-	-
3	Kota Cilegon	1	Ya	-	-	-	-
4	Kota Serang	1	Ya	-	-	-	-
5	Kota Tangerang	1	Ya	-	-	-	-
6	Kota Tangerang Selatan	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Banten		-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI BALI

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Bali

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminder
1	Kabupaten Badung	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Bangli	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Buleleng	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Gianyar	1	Ya	-	-	-	-
5	Kabupaten Jembrana	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Karangasem	1	Ya	-	-	-	-
7	Kabupaten Klungkung	3	Ya	Ya	-	Ya	-
8	Kabupaten Tabanan	1	Ya	-	-	-	-
9	Kota Denpasar	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bali		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Bali

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Badung	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Bangli	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Buleleng	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Gianyar	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Jembrana	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Klungkung	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Tabanan	-	-	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-	-	-
Provinsi Bali		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bali

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Badung	Ya	Ya	-	-
2	Kabupaten Bangli	-	-	-	-
3	Kabupaten Buleleng	Ya	-	-	-
4	Kabupaten Gianyar	-	-	-	-
5	Kabupaten Jembrana	Ya	-	-	-
6	Kabupaten Karangasem	-	-	-	-
7	Kabupaten Klungkung	Ya	-	-	-
8	Kabupaten Tabanan	Ya	-	-	-
9	Kota Denpasar	Ya	-	-	-
Provinsi Bali		Ya	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI BALI – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bali

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Badung	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Bangli	Ya	-	-	-	-
3	Kabupaten Buleleng	Ya	Ya	-	-	-
4	Kabupaten Gianyar	Ya	Ya	Ya	Ya	-
5	Kabupaten Jembrana	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Karangasem	Ya	Ya	Ya	-	-
7	Kabupaten Klungkung	Ya	-	-	-	-
8	Kabupaten Tabanan	Ya	-	-	-	-
9	Kota Denpasar	Ya	-	Ya	Ya	-
Provinsi Bali		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bali

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Badung	Ya	-	Ya
2	Kabupaten Bangli	Ya	Ya	-
3	Kabupaten Buleleng	Ya	-	Ya
4	Kabupaten Gianyar	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Jembrana	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Karangasem	-	-	-
7	Kabupaten Klungkung	Ya	-	Ya
8	Kabupaten Tabanan	Ya	Ya	Ya
9	Kota Denpasar	Ya	Ya	Ya
Provinsi Bali		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Bali

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kabupaten Badung	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Bangli	5	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Buleleng	5	Ya	Ya	Ya	-	-
4	Kabupaten Gianyar	1	Ya	-	-	-	-
5	Kabupaten Jembrana	5	Ya	Ya	-	Ya	Ya
6	Kabupaten Karangasem	1	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Klungkung	3	Ya	Ya	-	Ya	-
8	Kabupaten Tabanan	1	Ya	-	-	-	-
9	Kota Denpasar	5	Ya	Ya	-	-	-
Provinsi Bali		5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI NTB

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Lombok Barat	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Lombok Tengah	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Lombok Utara	2	Ya	Ya	-	-	-
4	Kab. Sumbawa Barat	1	Ya	-	-	-	-
5	Kabupaten Bima	1	Ya	-	-	-	-
6	Kabupaten Dompu	1	Ya	-	-	-	-
7	Kabupaten Lombok Timur	1	Ya	-	-	-	-
8	Kabupaten Sumbawa	1	Ya	-	-	-	-
9	Kota Bima	1	Ya	-	-	-	-
10	Kota Mataram	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi NTB		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Lombok Barat	-	-	-	-	-
2	Kab. Lombok Tengah	-	-	-	-	-
3	Kab. Lombok Utara	-	-	-	-	-
4	Kab. Sumbawa Barat	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Bima	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Dompu	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Lombok Timur	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Sumbawa	-	-	-	-	-
9	Kota Bima	-	-	-	-	-
10	Kota Mataram	-	-	-	-	-
Provinsi NTB		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Lombok Barat	-	-	-	-
2	Kab. Lombok Tengah	-	-	-	-
3	Kab. Lombok Utara	Ya	-	-	-
4	Kab. Sumbawa Barat	Ya	-	Ya	-
5	Kabupaten Bima	-	-	-	-
6	Kabupaten Dompu	Ya	Ya	-	-
7	Kabupaten Lombok Timur	-	-	-	-
8	Kabupaten Sumbawa	-	-	-	-
9	Kota Bima	-	-	-	-
10	Kota Mataram	-	-	-	-
Provinsi NTB		Ya	-	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI NTB – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Lombok Barat	Ya	-	-	-	Ya
2	Kab. Lombok Tengah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Lombok Utara	Ya	Ya	-	-	Ya
4	Kab. Sumbawa Barat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Bima	-	-	-	-	Ya
6	Kabupaten Dompu	-	-	-	-	Ya
7	Kabupaten Lombok Timur	-	Ya	-	-	-
8	Kabupaten Sumbawa	-	Ya	-	-	Ya
9	Kota Bima	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kota Mataram	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi NTB		Ya	-	Ya	-	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Lombok Barat	Ya	-	Ya
2	Kab. Lombok Tengah	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Lombok Utara	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Sumbawa Barat	Ya	Ya	-
5	Kabupaten Bima	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Dompu	Ya	-	Ya
7	Kabupaten Lombok Timur	Ya	Ya	-
8	Kabupaten Sumbawa	Ya	Ya	Ya
9	Kota Bima	Ya	Ya	Ya
10	Kota Mataram	Ya	Ya	Ya
Provinsi NTB		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admnduk
1	Kab. Lombok Barat	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Lombok Tengah	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Lombok Utara	2	Ya	Ya	-	-	-
4	Kab. Sumbawa Barat	1	Ya	-	-	-	-
5	Kabupaten Bima	1	Ya	Ya	-	-	-
6	Kabupaten Dompu	1	Ya	-	-	-	-
7	Kabupaten Lombok Timur	1	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Sumbawa	1	Ya	-	-	-	-
9	Kota Bima	1	Ya	-	-	-	-
10	Kota Mataram	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi NTB		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI NTT

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi NTT

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen			
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas
1	Kabupaten Ende	1	Ya	-	-	-
2	Kabupaten Kupang	1	Ya	-	-	-
3	Kabupaten Manggarai Barat	1	Ya	-	-	-
4	Kabupaten Sikka	1	Ya	-	-	-
Provinsi NTT		1	Ya	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi NTT

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Ende	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Kupang	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Manggarai Barat	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Sikka	-	-	-	-	-
Provinsi NTT		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi NTT

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Ende	Ya	-	Ya	Ya
2	Kabupaten Kupang	Ya	-	Ya	-
3	Kabupaten Manggarai Barat	Ya	-	Ya	-
4	Kabupaten Sikka	Ya	-	Ya	-
Provinsi NTT		Ya	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi NTT

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Ende	-	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Kupang	-	Ya	-	-	Ya
3	Kabupaten Manggarai Barat	-	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Sikka	-	Ya	-	-	Ya
Provinsi NTT		-	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi NTT

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Ende	Ya	Ya	Ya
2	Kabupaten Kupang	Ya	Ya	Ya
3	Kabupaten Manggarai Barat	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Sikka	Ya	Ya	Ya
Provinsi NTT		Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI NTT - LANJUTAN

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi NTT

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kabupaten Ende	1	Ya	-	-	-	-
2	Kabupaten Kupang	1	Ya	-	-	-	-
3	Kabupaten Manggarai Barat	1	Ya	-	-	-	-
4	Kabupaten Sikka	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi NTT		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Kapuas Hulu	2	Ya	-	-	Ya	-
2	Kab. Ketapang	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Sanggau	1	Ya	-	-	-	-
4	Kabupaten Bengkayang	2	Ya	-	-	Ya	-
5	Kabupaten Kayong Utara	2	Ya	-	-	Ya	-
6	Kabupaten Kubu Raya	1	Ya	-	-	-	-
7	Kabupaten Landak	1	Ya	-	-	-	-
8	Kabupaten Melawi	2	Ya	-	-	Ya	-
9	Kabupaten Mempawah	1	Ya	-	-	-	-
10	Kabupaten Sambas	1	Ya	-	-	-	-
11	Kabupaten Sekadau	2	Ya	-	-	Ya	-
12	Kabupaten Sintang	1	Ya	-	-	-	-
13	Kota Singkawang	2	Ya	-	-	Ya	-
Provinsi Kalimantan Barat		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-
2	Kab. Ketapang	-	-	-	-	-
3	Kab. Sanggau	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Bengkayang	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Kayong Utara	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Landak	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Melawi	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Mempawah	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Sambas	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Sekadau	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Sintang	-	-	-	-	-
13	Kota Singkawang	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Barat		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Kapuas Hulu	Ya	Ya	Ya	-
2	Kab. Ketapang	Ya	Ya	-	-
3	Kab. Sanggau	Ya	-	-	-
4	Kabupaten Bengkayang	Ya	Ya	-	-
5	Kabupaten Kayong Utara	-	-	-	-
6	Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-
7	Kabupaten Landak	-	-	-	-
8	Kabupaten Melawi	Ya	-	-	-
9	Kabupaten Mempawah	Ya	Ya	-	-
10	Kabupaten Sambas	Ya	-	Ya	-
11	Kabupaten Sekadau	-	-	-	-
12	Kabupaten Sintang	Ya	Ya	-	-
13	Kota Singkawang	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Barat		Ya	-	-	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN BARAT – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Kapuas Hulu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Ketapang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Sanggau	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Bengkayang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Kayong Utara	Ya	Ya	-	-	Ya
6	Kabupaten Kubu Raya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kabupaten Landak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kabupaten Melawi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kabupaten Mempawah	-	Ya	Ya	-	-
10	Kabupaten Sambas	-	-	Ya	Ya	Ya
11	Kabupaten Sekadau	Ya	Ya	-	-	Ya
12	Kabupaten Sintang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kota Singkawang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Kalimantan Barat		Ya	Ya	Ya	-	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Kapuas Hulu	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Ketapang	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Sanggau	Ya	Ya	Ya
4	Kabupaten Bengkayang	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Kayong Utara	Ya	Ya	Ya
6	Kabupaten Kubu Raya	Ya	Ya	Ya
7	Kabupaten Landak	Ya	Ya	Ya
8	Kabupaten Melawi	Ya	Ya	Ya
9	Kabupaten Mempawah	Ya	Ya	Ya
10	Kabupaten Sambas	-	-	-
11	Kabupaten Sekadau	Ya	Ya	Ya
12	Kabupaten Sintang	Ya	Ya	Ya
13	Kota Singkawang	Ya	Ya	Ya
Provinsi Kalimantan Barat		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Kapuas Hulu	2	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Ketapang	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Sanggau	1	Ya	-	-	-	-
4	Kabupaten Bengkayang	2	Ya	-	-	-	-
5	Kabupaten Kayong Utara	2	Ya	-	-	-	-
6	Kabupaten Kubu Raya	1	Ya	-	-	-	-
7	Kabupaten Landak	1	Ya	-	-	-	-
8	Kabupaten Melawi	2	Ya	-	-	-	-
9	Kabupaten Mempawah	1	Ya	-	-	-	-
10	Kabupaten Sambas	1	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Sekadau	2	Ya	-	-	-	-
12	Kabupaten Sintang	1	Ya	-	-	-	-
13	Kota Singkawang	2	Ya	-	-	-	79
Provinsi Kalimantan Barat		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Lamandau	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Barito Selatan	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Barito Timur	1	Ya	-	-	-	-
4	Kab. Barito Utara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Gunung Mas	1	Ya	-	-	-	-
6	Kab. Kapuas	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Katingan	2	Ya	-	-	Ya	-
8	Kab. Kotawaringin Timur	1	Ya	-	-	-	-
9	Kab. Pulang Pisau	1	Ya	-	-	-	-
10	Kab. Seruyan	1	Ya	-	-	-	-
11	Kab. Sukamara	2	Ya	-	-	Ya	-
12	Kota Palangkaraya	1	Ya	-	-	-	-
13	Kotawaringin Barat	2	Ya	-	-	Ya	-
Provinsi Kalimantan Tengah		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Lamandau	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
2	Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-
3	Kab. Barito Timur	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	4
4	Kab. Barito Utara	-	-	Ya	SK Bupati	7
5	Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-
6	Kab. Kapuas	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
7	Kab. Katingan	-	-	Ya	SK Bupati	5
8	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-
9	Kab. Pulang Pisau	-	-	Ya	SK Bupati	6
10	Kab. Seruyan	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	7
11	Kab. Sukamara	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	8
12	Kota Palangkaraya	-	-	Ya	SK Walikota	8
13	Kotawaringin Barat	Ya	Peraturan Walikota	Ya	SK Walikota	9
Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Lamandau	Ya	Ya	-	-
2	Kab. Barito Selatan	Ya	Ya	-	-
3	Kab. Barito Timur	Ya	Ya	Ya	-
4	Kab. Barito Utara	Ya	Ya	Ya	-
5	Kab. Gunung Mas	Ya	Ya	-	-
6	Kab. Kapuas	Ya	-	-	-
7	Kab. Katingan	Ya	Ya	-	-
8	Kab. Kotawaringin Timur	Ya	Ya	-	-
9	Kab. Pulang Pisau	Ya	-	-	-
10	Kab. Seruyan	Ya	Ya	-	-
11	Kab. Sukamara	-	-	-	-
12	Kota Palangkaraya	Ya	Ya	Ya	-
13	Kotawaringin Barat	Ya	Ya	-	-
Provinsi Kalimantan Tengah		Ya	Ya	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Lamandau	-	Ya	Ya	Ya	-
2	Kab. Barito Selatan	-	Ya	Ya	Ya	-
3	Kab. Barito Timur	Ya	Ya	Ya	Ya	-
4	Kab. Barito Utara	-	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Gunung Mas	Ya	Ya	Ya	Ya	-
6	Kab. Kapuas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Katingan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Kotawaringin Timur	-	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Pulang Pisau	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Seruyan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kab. Sukamara	-	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kota Palangkaraya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kotawaringin Barat	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Kalimantan Tengah		-	Ya	-	-	-

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Lamandau	Ya	-	Ya
2	Kab. Barito Selatan	-	-	-
3	Kab. Barito Timur	-	-	Ya
4	Kab. Barito Utara	Ya	-	Ya
5	Kab. Gunung Mas	-	-	Ya
6	Kab. Kapuas	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Katingan	Ya	Ya	Ya
8	Kab. Kotawaringin Timur	Ya	Ya	Ya
9	Kab. Pulang Pisau	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Seruyan	Ya	Ya	Ya
11	Kab. Sukamara	Ya	-	Ya
12	Kota Palangkaraya	Ya	-	Ya
13	Kotawaringin Barat	Ya	Ya	Ya
Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Lamandau	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Barito Selatan	1	-	-	-	-	-
3	Kab. Barito Timur	1	Ya	-	-	-	-
4	Kab. Barito Utara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Gunung Mas	1	Ya	-	-	-	-
6	Kab. Kapuas	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Katingan	2	Ya	-	-	-	-
8	Kab. Kotawaringin Timur	1	Ya	-	-	-	-
9	Kab. Pulang Pisau	1	Ya	-	-	-	-
10	Kab. Seruyan	1	Ya	-	-	-	-
11	Kab. Sukamara	2	Ya	-	-	-	-
12	Kota Palangkaraya	1	Ya	-	-	-	-
13	Kotawaringin Barat	2	Ya	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Tengah		1	-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen			
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas
	Provinsi Kalimantan Selatan	5	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK dan Sektor yang terlibat di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
	Provinsi Kalimantan Selatan	Ya	Keputusan Gubernur	Ya	SK Gubernur	15

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
	Provinsi Kalimantan Selatan	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
	Provinsi Kalimantan Selatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
	Provinsi Kalimantan Selatan	Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map			
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas
	Provinsi Kalimantan Selatan	5	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Berau	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Kutai Timur	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Kutai Barat	1	Ya	-	-	-	-
4	Kab. kutai kartanegara	1	Ya	-	-	-	-
5	Kab. Mahakam Ulu	1	Ya	-	-	-	-
6	Kab. Paser	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Penajam Paser Utara	1	Ya	-	-	-	-
8	Kota Balikpapan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kota Samarinda	1	Ya	-	-	-	-
10	Kota Bontang	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Timur		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Berau	-	-	-	-	-
2	Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	-
3	Kab. Kutai Barat	-	-	-	-	-
4	Kab. kutai kartanegara	-	-	-	-	-
5	Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-
6	Kab. Paser	-	-	-	-	-
7	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-
8	Kota Balikpapan	-	-	-	-	-
9	Kota Samarinda	-	-	-	-	-
10	Kota Bontang	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Timur		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Berau	-	-	-	-
2	Kab. Kutai Timur	-	-	-	-
3	Kab. Kutai Barat	Ya	-	-	-
4	Kab. kutai kartanegara	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Mahakam Ulu	Ya	-	-	-
6	Kab. Paser	Ya	Ya	-	-
7	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	-	-
8	Kota Balikpapan	Ya	-	Ya	-
9	Kota Samarinda	Ya	Ya	-	-
10	Kota Bontang	Ya	-	-	-
Provinsi Kalimantan Timur		-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR – LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Berau	-	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Kutai Timur	-	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Kutai Barat	-	-	Ya	Ya	Ya
4	Kab. kutai kartanegara	-	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Mahakam Ulu	-	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Paser	-	-	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Penajam Paser Utara	-	Ya	Ya	-	-
8	Kota Balikpapan	Ya	Ya	-	-	-
9	Kota Samarinda	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kota Bontang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Kalimantan Timur		-	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Berau	-	Ya	Ya
2	Kab. Kutai Timur	-	Ya	Ya
3	Kab. Kutai Barat	Ya	Ya	Ya
4	Kab. kutai kartanegara	-	-	Ya
5	Kab. Mahakam Ulu	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Paser	-	-	Ya
7	Kab. Penajam Paser Utara	Ya	-	Ya
8	Kota Balikpapan	Ya	Ya	Ya
9	Kota Samarinda	Ya	Ya	Ya
10	Kota Bontang	Ya	Ya	Ya
Provinsi Kalimantan Timur		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admnduk
1	Kab. Berau	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Kutai Timur	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Kutai Barat	1	Ya	-	-	-	-
4	Kab. kutai kartanegara	1	Ya	-	-	-	-
5	Kab. Mahakam Ulu	1	Ya	-	-	-	-
6	Kab. Paser	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Penajam Paser Utara	1	Ya	Ya	-	-	-
8	Kota Balikpapan	5	Ya	Ya	Ya	Ya	-
9	Kota Samarinda	1	Ya	-	-	-	-
10	Kota Bontang	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Timur		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Tana Tidung	1	Ya	-	-	-	-
2	kabupaten bulungan	1	Ya	-	-	-	-
3	kabupaten malinau	1	Ya	-	-	-	-
4	kabupaten nunukan	1	Ya	-	-	-	-
5	Kota Tarakan	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Utara		-	-	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-
2	kabupaten bulungan	-	-	-	-	-
3	kabupaten malinau	-	-	-	-	-
4	kabupaten nunukan	-	-	-	-	-
5	Kota Tarakan	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Utara		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Tana Tidung	Ya	-	-	-
2	kabupaten bulungan	Ya	-	-	-
3	kabupaten malinau	Ya	-	-	-
4	kabupaten nunukan	Ya	-	-	-
5	Kota Tarakan	Ya	-	-	-
Provinsi Kalimantan Utara		-	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Tana Tidung	-	Ya	Ya	Ya	Ya
2	kabupaten bulungan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	kabupaten malinau	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	kabupaten nunukan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kota Tarakan	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Kalimantan Utara		-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI KALIMANTAN UTARA – LANJUTAN

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Tana Tidung	Ya	Ya	Ya
2	kabupaten bulungan	Ya	Ya	Ya
3	kabupaten malinau	Ya	Ya	Ya
4	kabupaten nunukan	Ya	Ya	Ya
5	Kota Tarakan	Ya	Ya	Ya
Provinsi Kalimantan Utara		-	-	-

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Tana Tidung	1	Ya	-	-	-	-
2	kabupaten bulungan	1	Ya	-	-	-	-
3	kabupaten malinau	1	Ya	-	-	-	-
4	kabupaten nunukan	1	Ya	-	-	-	-
5	Kota Tarakan	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Utara		-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SULAWESI UTARA

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara

No	Kab/Kota	Cakupan	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
		Pilar	Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Bolaang Mongondow	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Kep Talaud	2	Ya	Ya	-	-	-
3	Kab. Minahasa	5	Ya	Ya	-	-	-
4	Kab. Minahasa Utara	1	Ya	-	-	-	-
5	Kota Kotamobagu	4	Ya	Ya	Ya	Ya	-
6	Kota Tomohon	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sulawesi Utara		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	-	-	-
2	Kab. Kep Talaud	-	-	-	-	-
3	Kab. Minahasa	-	-	Ya	Univ. Samratulangi	1
4	Kab. Minahasa Utara	-	-	Ya	Kepala Dinas OPD PPKB	1
5	Kota Kotamobagu	-	-	-	-	-
6	Kota Tomohon	-	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Utara		-	-	Ya	SK Kaper	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Bolaang Mongondow	Ya	Ya	-	-
2	Kab. Kep Talaud	Ya	-	Ya	-
3	Kab. Minahasa	-	-	-	-
4	Kab. Minahasa Utara	Ya	-	-	-
5	Kota Kotamobagu	Ya	-	-	-
6	Kota Tomohon	Ya	Ya	-	-
Provinsi Sulawesi Utara		Ya	Ya	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI Sulawesi Utara - LANJUTAN

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	Ya	Ya	Ya	-
2	Kab. Kep Talaud	Ya	Ya	-	-	Ya
3	Kab. Minahasa	-	-	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Minahasa Utara	-	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kota Kotamobagu	Ya	Ya	Ya	-	-
6	Kota Tomohon	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sulawesi Utara		Ya	Ya	Ya	-	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI SULAWESI UTARA - LANJUTAN

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Bolaang Mongondow	Ya	Ya	-
2	Kab. Kep Talaud	Ya	Ya	-
3	Kab. Minahasa	-	-	-
4	Kab. Minahasa Utara	Ya	Ya	Ya
5	Kota Kotamobagu	Ya	Ya	-
6	Kota Tomohon	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sulawesi Utara		Ya	Ya	Tidak

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Bolaang Mongondow	5	-	-	-	-	-
2	Kab. Kep Talaud	2	-	-	-	-	-
3	Kab. Minahasa	5	-	-	-	-	-
4	Kab. Minahasa Utara	1	Ya	-	-	-	-
5	Kota Kotamobagu	4	-	-	-	-	-
6	Kota Tomohon	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sulawesi Utara		1	-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
	Provinsi Sulawesi Tengah	Ya	-	-	Ya	-

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
	Provinsi Sulawesi Tengah	Ya	Ya	-

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
	Provinsi Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Cakupan	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
		Pilar	Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Barru	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Bone	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Enrekang	2	Ya	-	-	Ya	-
4	Kab. Gowa	3	Ya	Ya	-	Ya	-
5	Kab. Kepulauan Selayar	1	Ya	-	-	-	-
6	Kab. Luwu	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Luwu Timur	1	Ya	-	-	-	-
8	Kab. Luwu Utara	1	Ya	-	-	-	-
9	Kab. Maros	3	Ya	Ya	-	Ya	-
10	Kab. Pangkajene Kepulauan	2	Ya	Ya	-	Ya	-
11	Kab. Pinrang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kab. Sidenreng Rappang	3	Ya	Ya	-	Ya	-
13	Kab. Soppeng	2	Ya	-	-	Ya	-
14	Kab. Toraja Utara	2	Ya	Ya	-	-	-
15	Kab. Wajo	3	Ya	Ya	-	Ya	-
16	Kab. Janeponto	1	Ya	-	-	-	-
17	Kab. Takalar	1	Ya	-	-	-	-
18	Kab. Bulukumba	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
19	Kota Makassar	3	Ya	Ya	-	Ya	-
20	Kota Parepare	3	Ya	Ya	-	Ya	-
Provinsi Sulawesi Selatan		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Barru	-	-	Ya	SK Bupati	-
2	Kab. Bone	-	-	-	-	-
3	Kab. Enrekang	-	-	Ya	SK Bupati	-
4	Kab. Gowa	-	-	-	-	-
5	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	Ya	SK Bupati	-
6	Kab. Luwu	-	-	-	-	-
7	Kab. Luwu Timur	-	-	Ya	SK Bupati	-
8	Kab. Luwu Utara	-	-	Ya	SK Bupati	-
9	Kab. Maros	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	-
10	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	Ya	SK Bupati	-
11	Kab. Pinrang	-	-	-	-	-
12	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	Ya	SK Bupati	-
13	Kab. Soppeng	-	-	-	-	-
14	Kab. Toraja Utara	-	-	Ya	SK Bupati	-
15	Kab. Wajo	-	-	Ya	SK OPD	-
16	Kab. Janeponto	-	-	-	-	-
17	Kab. Takalar	-	-	-	-	-
18	Kab. Bulukumba	Ya	Kepala DPPKB	Ya	SK Bupati	6
19	Kota Makassar	-	-	-	-	-
20	Kota Parepare	-	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Selatan		-	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SULAWESI SELATAN – LANJUTAN 1

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Barru	Ya	-	-	-
2	Kab. Bone	-	-	-	-
3	Kab. Enrekang	Ya	-	-	-
4	Kab. Gowa	Ya	-	-	-
5	Kab. Kepulauan Selayar	Ya	-	-	-
6	Kab. Luwu	Ya	-	-	-
7	Kab. Luwu Timur	-	-	-	-
8	Kab. Luwu Utara	-	-	-	-
9	Kab. Maros	Ya	Ya	-	-
10	Kab. Pangkajene Kepulauan	Ya	Ya	-	-
11	Kab. Pinrang	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kab. Sidenreng Rappang	Ya	-	-	-
13	Kab. Soppeng	Ya	-	-	-
14	Kab. Toraja Utara	Ya	-	-	-
15	Kab. Wajo	Ya	Ya	-	-
16	Kab. Janeponto	Ya	-	-	-
17	Kab. Takalar	Ya	-	-	-
18	Kab. Bulukumba	-	-	-	-
19	Kota Makassar	Ya	Ya	-	-
20	Kota Parepare	Ya	-	-	-
Provinsi Sulawesi Selatan		Ya	-	-	Ya

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Barru	-	Ya	-	-	Ya
2	Kab. Bone	-	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Enrekang	-	Ya	Ya	-	Ya
4	Kab. Gowa	-	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Kepulauan Selayar	-	Ya	Ya	-	Ya
6	Kab. Luwu	-	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kab. Luwu Timur	-	-	Ya	Ya	-
8	Kab. Luwu Utara	-	-	Ya	Ya	-
9	Kab. Maros	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kab. Pinrang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Kab. Sidenreng Rappang	Ya	Ya	-	-	-
13	Kab. Soppeng	-	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Kab. Toraja Utara	-	Ya	-	-	-
15	Kab. Wajo	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
16	Kab. Janeponto	-	Ya	-	-	-
17	Kab. Takalar	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
18	Kab. Bulukumba	-	-	-	-	-
19	Kota Makassar	Ya	Ya	Ya	Ya	-
20	Kota Parepare	Ya	Ya	-	-	-
Provinsi Sulawesi Selatan		-	Ya	Ya	-	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI SULAWESI SELATAN – LANJUTAN 2

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Barru	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Bone	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Enrekang	Ya	-	Ya
4	Kab. Gowa	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Kepulauan Selayar	Ya	Ya	Ya
6	Kab. Luwu	Ya	-	Ya
7	Kab. Luwu Timur	-	-	-
8	Kab. Luwu Utara	-	-	-
9	Kab. Maros	Ya	Ya	Ya
10	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	Ya	Ya
11	Kab. Pinrang	Ya	Ya	Ya
12	Kab. Sidenreng Rappang	Ya	-	Ya
13	Kab. Soppeng	Ya	Ya	Ya
14	Kab. Toraja Utara	-	-	Ya
15	Kab. Wajo	Ya	Ya	Ya
16	Kab. Janeponto	Ya	Ya	Ya
17	Kab. Takalar	Ya	Ya	Ya
18	Kab. Bulukumba	Ya	-	-
19	Kota Makassar	Ya	-	Ya
20	Kota Parepare	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sulawesi Selatan		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Barru	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Bone	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Enrekang	2	Ya	-	-	-	-
4	Kab. Gowa	3	Ya	-	-	-	-
5	Kab. Kepulauan Selayar	1	Ya	-	-	-	-
6	Kab. Luwu	1	Ya	-	-	-	-
7	Kab. Luwu Timur	1	-	-	-	-	-
8	Kab. Luwu Utara	1	-	-	-	-	-
9	Kab. Maros	3	Ya	Ya	-	-	-
10	Kab. Pangkajene Kepulauan	2	Ya	-	-	-	-
11	Kab. Pinrang	5	Ya	Ya	Ya	Ya	-
12	Kab. Sidenreng Rappang	3	Ya	-	-	-	-
13	Kab. Soppeng	2	Ya	-	-	-	-
14	Kab. Toraja Utara	2	Ya	-	-	-	-
15	Kab. Wajo	3	Ya	-	-	-	-
16	Kab. Janeponto	1	Ya	Ya	-	-	-
17	Kab. Takalar	1	Ya	-	-	-	-
18	Kab. Bulukumba	5	-	-	-	-	-
19	Kota Makassar	3	Ya	-	-	-	-
20	Kota Parepare	3	Ya	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Selatan		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kota Kendari	1	Ya	-	-	-	-
	Provinsi Sulawesi Tenggara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kota Kendari	-	-	Ya	SK Bupati	3
	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	Ya	SK Gubernur	2

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kota Kendari	Ya	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Ya	-	Ya	Ya

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kota Kendari	-	-	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kota Kendari	Ya	-	Ya
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kota Kendari	1	-	-	-	-	-
	Provinsi Sulawesi Tenggara	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI GORONTALO

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Boalemo	1	Ya	-	-	-	-
2	Kab. Bone Bolango	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Gorontalo	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kab. Gorontalo Utara	1	Ya	-	-	-	-
5	Kab. Pahuwato	1	Ya	-	-	-	-
6	Kota Gorontalo	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Gorontalo		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Boalemo	-	-	-	-	-
2	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	-
3	Kab. Gorontalo	Ya	Peraturan Bupati	-	-	-
4	Kab. Gorontalo Utara	-	-	-	-	-
5	Kab. Pahuwato	-	-	-	-	-
6	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-
Provinsi Gorontalo		-	-	-	-	-

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Boalemo	-	-	-	-
2	Kab. Bone Bolango	Ya	-	-	-
3	Kab. Gorontalo	Ya	-	-	-
4	Kab. Gorontalo Utara	Ya	-	Ya	-
5	Kab. Pahuwato	Ya	-	-	-
6	Kota Gorontalo	Ya	Ya	Ya	-
Provinsi Gorontalo		Ya	-	Ya	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Boalemo	-	Ya	-	-	-
2	Kab. Bone Bolango	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Gorontalo	Ya	Ya	-	-	Ya
4	Kab. Gorontalo Utara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Pahuwato	-	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Kota Gorontalo	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Gorontalo		-	-	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI GORONTALO- LANJUTAN

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Boalemo	-	-	-
2	Kab. Bone Bolango	Ya	Ya	Ya
3	Kab. Gorontalo	-	-	Ya
4	Kab. Gorontalo Utara	Ya	Ya	Ya
5	Kab. Pahuwato	Ya	-	Ya
6	Kota Gorontalo	Ya	Ya	Ya
Provinsi Gorontalo		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Boalemo	1	-	-	-	-	-
2	Kab. Bone Bolango	1	Ya	-	-	-	-
3	Kab. Gorontalo	5	-	-	-	-	-
4	Kab. Gorontalo Utara	1	Ya	-	-	-	-
5	Kab. Pahuwato	1	Ya	-	-	-	-
6	Kota Gorontalo	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Gorontalo		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI SULAWESI BARAT

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Barat

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Mamuju Tengah	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Pasang Kayu/ Mamuju Utara	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Barat		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Barat

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	-	-
2	Kab. Pasang Kayu/ Mamuju Utara	-	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Barat		-	-	Ya	SK Gubernur	13

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Barat

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	-
2	Kab. Pasang Kayu/ Mamuju Utara	Ya	-	-	-
Provinsi Sulawesi Barat		Ya	-	-	Ya

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Barat

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Mamuju Tengah	-	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Pasang Kayu/ Mamuju Utara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sulawesi Barat		-	Ya	Ya	-	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Barat

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Mamuju Tengah	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Pasang Kayu/ Mamuju Utara	Ya	Ya	Ya
Provinsi Sulawesi Barat		Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN :

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Barat

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Admindak
1	Kab. Mamuju Tengah	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kab. Pasang Kayu/ Mamuju Utara	1	Ya	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Barat		1	Ya	-	-	-	-

PROVINSI MALUKU

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Maluku

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kota Ambon	1	Ya	-	-	-	-
	Provinsi Maluku	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Maluku

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kota Ambon	-	-	-	-	-
	Provinsi Maluku	-	-	Ya	SK Gubernur	4

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Maluku

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kota Ambon	Tidak Ada	-	-	-
	Provinsi Maluku	Ada	-	Ada	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Maluku

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kota Ambon	-	-	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Maluku	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Maluku

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kota Ambon	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Maluku	Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Maluku

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kota Ambon	1	Ya	-	-	-	-
	Provinsi Maluku	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

LAMPIRAN : PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Maluku Utara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Kepulauan Sula	1	Ya	-	-	-	-
2	Kota Ternate	2	Ya	Ya	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		1	Ya	-	-	-	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Maluku Utara

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kab. Kepulauan Sula	Ya	Peraturan Bupati	Ya	SK Bupati	4
2	Kota Ternate	Ya	Peraturan Walikota	Ya	SK Walikota	5
Provinsi Maluku Utara		-	-	Ya	SK Gubernur	12

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Maluku Utara

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kab. Kepulauan Sula	Ya	-	-	-
2	Kota Ternate	-	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		Ya	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Maluku Utara

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kab. Kepulauan Sula	-	-	Ya	Ya	Ya
2	Kota Ternate	-	-	Ya	Ya	Ya
Provinsi Maluku Utara		Ya	-	Ya	-	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Maluku Utara

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kab. Kepulauan Sula	Ya	-	Ya
2	Kota Ternate	Ya	Ya	Ya
Provinsi Maluku Utara		Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Maluku Utara

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kab. Kepulauan Sula	1	Ya	-	-	-	-
2	Kota Ternate	2	Ya	-	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		1	Ya	-	-	-	-

LAMPIRAN : PROVINSI PAPUA

Tabel 1. Cakupan Pilar dan Pilar yang dicakup pada Dokumen GDPK Kab/Kota dan Provinsi Papua

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang dicakup dalam Dokumen				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kabupaten Keerom	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Papua	3	Ya	Ya	-	Ya	-

Tabel 3. Apakah Ada Legalitas dan Bentuk Legalitas pada Dokumen GDPK, Apakah Ada SK Tim, Siapa yang Menandatangani SK, dan Sektor yang terlibat di Kab/Kota dan Provinsi Papua

No	Kab/Kota	Legalitas		SK Tim Penyusun GDPK		
		Ada	Bentuk	Ada	Bentuk	Jumlah Sektor
1	Kabupaten Keerom	Ya	Peraturan Bupati	Tidak	-	-
	Provinsi Papua	-	-	Ya	Lainnya	7

Tabel 4. Apakah Ada Proyeksi, Proyeksi Kelompok Umur, Analisis Proyeksi dan Kebutuhan Proyeksi pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Papua

No	Kab/Kota	Proyeksi	Proyeksi Kelompok Umur	Analisis Proyeksi	Kebutuhan Proyeksi
1	Kabupaten Keerom	Ada	Ada	Ada	-
	Provinsi Papua	Ada	-	-	-

Tabel 5. Apakah Ada Isu Strategis, Kondisi Ideal, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Papua

No	Kab/Kota	Isu Strategis	Kondisi Ideal	Visi	Misi	Tujuan Pembangunan
1	Kabupaten Keerom	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Papua	-	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6. Apakah Ada Arah Kebijakan, Strategi dan Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Papua

No	Kab/Kota	Arah Kebijakan	Strategi	Roadmap
1	Kabupaten Keerom	Ya	-	Ya
	Provinsi Papua	Ya	Ya	Ya

Tabel 7. Cakupan Pilar dan Pilar yang Memiliki Roadmap pada Dokumen GDPK di Kab/Kota dan Provinsi Papua

No	Kab/Kota	Cakupan Pilar	Pilar yang Memiliki Road Map				
			Kuantitatif	Kualitatif	PK	Mobilitas	Adminduk
1	Kabupaten Keerom	5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Provinsi Papua	3	Ya	-	-	-	-